

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM

S K R I P S I

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memeperolah Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



TENGKU SYAFRIZAL
NIM : 10721000265

PROGRAM S1
JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1434 H / 2013 M

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim*. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan bahwa perkembangan sains dalam bidang pengobatan telah menemukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemandulan, diantaranya adalah dengan melakukan transplantasi rahim (*uterus*).

Oleh sebab itu, penelitian ini ingin menjawab permasalahan penelitian bagaimana proses melakukan transplantasi rahim? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi rahim?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan transplantasi rahim dan hukum Islam tentang transplantasi rahim. Sumber data diperoleh melalui bahan primer dan bahan sekunder, setelah itu dianalisis dengan deskriptif analisis dan content analisis.

Hasil atau temuan penelitian ini adalah : *Pertama*. Proses operasi transplantasi rahim berjalan seperti proses operasi organ tubuh lainnya. Untuk memindahkan rahim, tim dokter akan menyayat perut pasien sepanjang enam inci (15,24 cm) mulai dari bawah pusar hingga tulang pubis. Untuk itu, penerima organ rahim harus berada dalam keadaan stabil dengan mengkonsumsi obat anti penolakan organ minimal tiga bulan sebelum kehamilan direncanakan. Setelah itu, embrio yang sudah dibekukan di transfer kedalam rahim baru (*resipien*) dengan cara normal yaitu melalui vagina. Untuk mengurangi resiko komplikasi dan kegagalan kehamilan, setelah proses ini, pasien diharapkan tidak melakukan hubungan seksual.

Kedua, Seorang wanita dapat mendonorkan rahimnya kepada wanita lain yang mengalami kerusakan rahim, dengan syarat indung telornya masih berfungsi dengan baik. Tindakan ini menurut Hukum Islam diperbolehkan karena transplantasi rahim tidak menyebabkan terjadinya pencampuran nasab dan tidak pula mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.

ABSTRACT

This Thesis entitled Review of Islamic Law Against uterus transplant, grounded by the research question that the development of science in the field of treatment have found various ways to overcome infertility problems, among which is to do transplantsi womb (uterus).

Therefore, this study would like to answer the research concerns how the process of doing uterus transplant? And how Islamic legal review of the uterus transplant?

This study is a research library (Library Research), which compiled the data from reference books and papers related to the transplantation of the uterus and Islamic law womb transplant. Data source material obtained through primary and secondary material, after it was analyzed by descriptive analysis and content analysis.

Results or findings of this study are: First. Womb transplant operation process running as process operations other organs. To remove the uterus, stomach wrenching team physicians will be patient during the six-inch (15.24 cm) from the navel to the pubis bone. To the uterus recipients must be in a stable condition by consuming minimal organ anti-rejection drugs three months prior to pregnancy was planned. After that, the already frozen embryo transfer into the uterus in a new (recipients) that is the normal way through the vagina. To reduce the risk of pregnancy complications and failure, after this process, the patient is not expected to have a sexual relationship.

Second, a woman can be donated wombs of women who suffer from uterine damage, provided telornya mother still works fine. This action is in accordance with Islamic law allowed for transpalantasi uterus does not cause mixing descendant nor affect survival pendonor.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Tiada kata lain yang pantas diucapkan selain kata syukur atas semua nikmat yang telah Allah SWT berikan, terutama nikmat kesehatan, kemampuan dan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Rahim”**, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada baginda Rasulullah SAW yang telah berjuang mengenalkan ilmu pengetahuan pada kita semua sehingga kita bisa merasakannya sekarang.

Dalam penulisan skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan moril berupa bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Tengku Zaiman dan Ibunda Syabariah (alm) serta Ibunda yang tercinta Syamsinar, S.Pd yang telah mengorbankan tenaga dan waktu untuk membiayai perkuliahan ananda. Yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan ananda, serta memberikan limpahan kasih sayang dan nasehat untuk berbuat sesuatu yang terbaik demi masa depan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta stafnya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, MA, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta PD I, PD II, dan PD III.
4. Bapak Drs. Yusran Sabili M.Ag selaku ketua jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah. Serta Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku sekretaris jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
5. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.Ag selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing penulis, memberikan nasehat-nasehat serta saran-saran yang membuat penulis bersemangat hingga skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Bapak Drs. Ahmad Darbi, B. M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah mendidik dan membina penulis dalam perkuliahan dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis.
7. Bapak dan ibu dosen yang telah mendidik dan membina penulis dalam perkuliahan, bapak dan Ibu staf Kasubag dan Subag serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

8. Bapak dan Ibu Pimpinan Perpustakaan UIN Suska Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan Studi Kepustakaan.
9. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah, teman-teman KKN, teman-teman Kost, dan seluruh teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dalam dalam penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT meredhoi dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna bermanfaat untuk dimasa mendatang.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua, dan menjadi amal shaleh di sisi Allah SWT. Amin....

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 14 Juni 2013

Penulis

TENGKU SYAFRIZAL
10721000265

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Studi Kepustakaan	6
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	9
 BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Hukum Islam	11
B. Sumber Hukum Islam	15
C. Metode Menetapkan Hukum Islam	23
D. Sejarah Menetapkan Hukum Islam	33
E. Karakteristik Hukum Islam	36
 BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI	
A. Pengertian Transplantasi	39
B. Sejarah Transplantasi	40

C. Proses Transplantasi	43
D. Transplantasi Dalam Dunia Kedokteran	44

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG TRANSPLANTASI

RAHIM

A. Proses Transplantasi Rahim Dalam Dunia Kedokteran	52
B. Metode Hukum Islam Dalam Menetapkan Hukum Transpalantasi Rahim	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran	67

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sains dalam bidang pengobatan telah menemukan berbagai cara untuk mengatasi masalah kemandulan, yang *natijahnya* manusia bisa memiliki anak bukan dengan cara biasa yaitu melalui hubungan kelamin suami isteri. Diantara cara yang telah ditemukan oleh para pengkaji pengobatan yang tersebar di Barat, ilmu bio medis merancang beberapa cara antara lain dengan inseminasi buatan bayi tabung (IVF), *Kloning*, meminjam rahim (*sorogate mother*), dan baru-baru ini penawaran radikal dilontarkan oleh sebuah rumah sakit di New York. Sebuah alternatif yaitu melakukan transplantasi rahim (*uterus*).

Ketika ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju apa yang semula dikenal sebagai wilayah prerogatif Allah, ini mulai dijelajahi. Sehubungan hal yang diatas sekarang kehamilan bisa dicari sekaligus bisa dihindari seperti dalam masalah orang yang tidak bisa hamil karena kemandulan, kerusakan rahim akibat kangker atau bahkan karena terlahir tanpa memilki organ rahim, walaupun merupakan takdir Allah SWT dianggap sebagai suatu penyakit karena ia bertentangan dengan keadaan yang normal. Maka usaha untuk mengobati penyakit merupakan perkara yang dituntut oleh syara' selagi cara yang digunakan tidak bertentangan dengan kehendak syara'.¹

¹ Luthfi Assyaukanie, *Politik. HAM. dan Isu-isu Teknologi dalam Fiqih Kontemporer*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1998), h. 141.

Transplantasi rahim membantu pasangan suami istri untuk mendapatkan keturunan, berguna untuk membantu pasangan suami istri dalam mengatasi masalah kerusakan organ rahim (*uterus*). Keberatan awal yang mungkin muncul terhadap langkah-langkah *bio medis* transplantasi rahim, adalah Apakah tindakan tersebut dapat dibenarkan oleh norma-norma hukum.

Transplantasi rahim (*uterus*) merupakan penemuan radikal baru dalam dunia kedokteran yang lahir dari sebuah rumah sakit di New York Downtown oleh Dr. Giuseppe Del Priore. Meskipun menuai pro dan kontra, namun proses pengobatan ini memberikan harapan bagi pasangan suami istri yang menginginkan anak yang lahir dari istrinya, sedangkan istrinya tidak bisa hamil karena tidak memiliki rahim sejak lahir ataupun mengalami kerusakan rahim. Misalnya penyakit tumor yang disebut *fibroid*, gangguan saluran indung telur atau *endometriosis* kanker servik (kanker leher rahim), kanker rahim (kanker uterus) sehingga rahimnya harus diangkat, infertilisasi pada wanita.² Adalah wajar bila pasangan suami istri yang mandul berusaha dengan segala daya dan upaya serta kemampuannya yang ada, agar dapat memperoleh anak, mengingat begitu pentingnya anak, baik bagi kesenangan duniawi maupun sebagai salah satu simpanan untuk di akhirat nanti.

Selain Rumah Sakit New York Downtown, Transplantasi rahim manusia telah dilakukan oleh beberapa Rumah Sakit lain diantaranya Rumah sakit di Arab Saudi pada tahun 2000, dan sebelumnya, Dalam riset yang dilakukan pada hewan oleh Profesor Brannstrom dan timnya dari lembaga penelitian

² Soumy Ana, *Menjaga Kesuburan*, Prestasi, Jakarta, 2008, h. 66

Akademi Sahlgrenska, Swedia, dari 14 ekor domba yang dicoba transplantasi autologus, empat ekor terbukti berhasil bunting. Ilmuan asal Universitas Pittsburgh melakukan transplantasi rahim pada monyet.³

Sebenarnya, kajian yang membahas hukum syariah tentang praktek transplantasi jaringan maupun organ tubuh dalam khazanah intelektual dan keilmuan fikih Islam klasik relatif jarang dan hampir tidak pernah dikupas oleh para *fuqaha* secara mendetail dan jelas yang mungkin karena faktor barunya masalah ini dan dimensi terkaitnya yang kompleks yang meliputi kasus transplantasi.

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*,⁴ yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan dalam Bahasa Arab transplantasi disebut dengan *Naqlu Al-A'da, zira'a al-a'dai'i*.⁵

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ adalah penggantian organ tubuh atau anggota badan yang rusak atau tidak normal supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁶

Pada awalnya transplantasi organ tubuh hanya terbatas pada tiga macam organ tubuh, yaitu mata, ginjal, dan jantung. Ini tidak lepas dari segi struktur anatomi manusia. Ketiga organ tubuh tersebut sangatlah vital bagi kehidupan

³ <http://www.f-buzz.com/2008/08/05/transplantasi-rahim/>

⁴ A.S. Homby, SC., *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, t.t. h. 1075.

⁵ Ahmad Muhammad Kan'an, *Al-Mausu'atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah*, (Dar Al Nafa'is, Beirut, t.t), h. 713.

⁶ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.2, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h.192.

manusia.⁷ Akan tetapi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang makin canggih, transpalntasi organ tubuh tidak terbatas hanya pada tiga organ tubuh diatas. Salah satunya adalah transpalantasi rahim.

Mufti Muhammad Syafi'i dari pakistan dan Dr. Abd. Salam al-Syukri dari Mesir. Mufti Syafi'i berpendapat bahwa transplantasi organ tidak diperbolehkan berdasarkan tiga prinsip. *Pertama*, kesucian hidup atau tubuh manusia. *Kedua*, tubuh manusia adalah amanah. *Ketiga*, praktik transplantasi tersebut dapat dikategorikan sebagai sikap yang memberlakukan tubuh manusia sebagai material.⁸

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Zakariya al-Anshari yang menyatakan bahwa agama tidak memperkenankan pencangkakan tulang manusia untuk dilekatkan pada manusia lain, apapun keadaan donornya (masih hidup/mati).⁹

Berbeda dengan pendapat diatas, Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa transpalantasi dibolehkan, selama organ yang disumbangkan bukan merupakan organ vital.¹⁰ Yang dimaksud dengan organ vital, menurut beliau, adalah organ tubuh yang menentukan kelangsungan hidup pendonor. Meskipun pendonor, Mendonorkan organ rahim, yang merupakan organ satu-satunya dalam tubuh, tidak akan mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Toko gunung Agung, 1997), h. 85.

⁸ Abu Fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih kesehatan*, (Jakarta: Serambi, 2007), h. 84.

⁹ Zakariya al-Ansari, *Asna' al-Mathalib*, jilid I. h.172.

¹⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa Kontemprer*, (Mizan : Jakarta, 2000). h. 11

Pendapat Qardhawi tersebut, juga didukung oleh Lembaga Kajian Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada Mukhtamar Muhammadiyah XXI April 1980 dengan hasil kesimpulan: (butir 2) transplantasi dengan tujuan pengobatan, jika tidak dilakukan akan membahayakan jiwa pasien, ialah mubah, karena darurat; (butir 3) transplantasi organ dengan tujuan pengobatan cacat badan dapat dimasukkan urusan darurat, karena sangat diwajibkan untuk tidak menimbulkan komplikasi kejiwaan, maka hukumnya mubah pula.¹¹

Fenomena tersebut mengindiskan betapa upaya membangun saling pengertian antara praktisi medik dan kaum agamawan memerlukan proses dan waktu yang panjang, sebab perbedaan paradigma keilmuan sangat mempengaruhi penilaian masing-masing. Oleh karena itulah, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang Hukum Transplantasi Rahim menurut Hukum Islam.

B. Batasan Masalah

Didalam penelitian ini, yang menjadi inti dan fokus permasalahan penelitian adalah menganalisis hukum transplantasi rahim menurut hukum Islam. Sedangkan yang lain tidak termasuk inti dari penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses melakukan transplantasi rahim?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi rahim?

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1995), h. 117.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Proses melakukan transplantasi rahim
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi rahim

2. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk memenuhi persyaratan akhir dalam mendapatkan gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
- b. Dari segi teoritis: skripsi ini diharapkan dapat menambah khasanah pemikiran hukum Islam dalam masalah kontemporer (*Masail al-Fiqh al-Haditsah*) tentang tranpalantasi rahim.
- c. Dari segi praktis: dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah transpalantasi rahim.

E. Kajian Kepustakaan

Dibawah ini akan disebutkan beberapa buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang membahas tentang transplantasi : *Pertama*, buku Hasyim Abbas, *Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum Transplantasi*,¹² yang membahas secara umum tentang fatwa-fatwa hukum transplantasi baik secara kelembagaan maupun secara individual.

¹² Hasyim Abbas, *Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum Transplantasi*, (Jakarta: Paramedia, 2000).

Kedua, tulisan Imam Ghazali Said yang berjudul *Islam dan Transplatasi Organ Manusia*.¹³ Artikel ini membahas tentang kaidah fikih yang harus menjadi acuan dalam penerapan transplantasi organ, namun dalam artikel ini tidak membahas secara khusus tentang kaidah-kaidah fikih yang diterapkan dalam transplantasi rahim.

Ketiga, penelitian oleh Nurhasim tentang *Tinjauan hukum Islam terhadap transplantasi organ tubuh melalui jalur wasiat*.¹⁴ Skripsi ini, membahas tentang status kepemilikan organ tubuh bagi manusia dan apakah organ tubuh berada dalam lingkaran obyek wasiat.

Dari beberapa artikel dan skripsi diatas, Tentu sangat berbeda dengan pembahasan dalam skripsi ini, karena yang menjadi pembahasan utama adalah bagaimana, hukum secara syar'i melakukan transplantasi rahim.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang berkaitan dengan transpalantasi rahim.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas bahan primer dan bahan sekunder, yaitu:

¹³ Imam Ghazali Said, *Islam dan Transplatasi Organ Manusia*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

¹⁴ Nurhasim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transplantasi Organ Tubuh Melalui Jalur Wasiat" dalam *Skripsi*, IAIN Semarang, 2005.

a. Bahan Primer

Merupakan data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Sekunder

Merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber bahan primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks (*texts reading*) yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai bagaimana menganalisis transpalantasi rahim tersebut.

4. Teknik Analisis Data

a. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang transpalantasi rahim.

b. Metode content analisis (analisis isi), yaitu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, mempelajari dan melakukan analisis terhadap apa yang diselidiki.

5. Metode penulisan

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka penulis akan mengolah data tersebut dengan menggunakan beberapa metode :

- a. Induktif yaitu dengan menguraikan data khusus untuk kemudian dijabarkan secara umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.
- b. Deduktif yaitu membahas dari data-data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang khusus.
- c. Deskriptif analisis yaitu dengan jalan menggambarkan secara jelas dan tepat masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun secara sistematis yang tujuannya agar pembaca mudah memahami karya tulis ini, adapun sistematika tersebut meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, studi kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

Membahas tentang pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam, metode menetapkan hukum Islam, sejarah

pembentukan dan perkembangan hukum Islam, karakteristik hukum Islam.

BAB III : TINJAUAN TENTANG TRANSPLANTASI

Membahas tentang pengertian transplantasi, sejarah transplantasi, proses transplantasi, dan transplantasi dalam dunia kedokteran.

BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM

Membahas tentang proses transplantasi rahim dalam dunia kedokteran dan metode hukum Islam dalam menetapkan hukum transplantasi rahim.

BAB V : PENUTUP

Sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ISLAM

A. Pengertian Hukum Islam

Ada beberapa istilah penting yang bisa digunakan untuk memahami pengertian hukum Islam. Istilah-istilah tersebut adalah syariah, fikih, dan hukum Islam sendiri. Ketiga istilah ini sering dipahami secara tidak tepat, sehingga terkadang ketiganya saling tertukar. Untuk itu, perlu dijelaskan dulu masing-masing dari ketiga istilah tersebut dan hubungan antara ketiganya, terutama hubungan antara syariah dan fikih.

Syariah berasal dari kata *al- syari'ah* yang berarti 'jalan ke sumber air' atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan.¹ Syariah disamakan dengan jalan air mengingat bahwa barang siapa yang mengikuti syariah, ia akan mengalir dan bersih jiwanya.² Secara terminologis, syariah didefinisikan dengan sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya.³ Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan

¹ Muhammad Ibn Ya'qub Al-Fairuzabadiy., *Al-Qamus al-Muhith*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 659.

² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, Jilid 1. (Jakarta: Logos. 1999), h. 1.

³ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*. (Kairo: Dar al-Qalam.1966), h. 12.

agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim baik yang ditetapkan dengan Alqur'an maupun dengan Sunnah Rasul.⁴

Dari dua definisi syariah diatas dapat dipahami bahwa syariah adalah aturan-aturan Allah dan Rasulullah yang mengatur manusia dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dengan sesamanya.

Adapun kata 'fikih' berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu.⁵ Secara terminologis fikih didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliyah (praktis) yang digali dari dalil-dalil terperinci.⁶

Dari definisi ini dapat diambil beberapa pengertian bahwa fikih merupakan suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syara' terutama yang bersifat amaliyah dengan mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alqur'an dan Hadist.

Dengan demikian jelaslah bahwa pengertian fikih berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Allah Swt. dan Rasulullah Saw. untuk mengatur tingkah laku manusia baik dalam rangka berhubungan dengan Tuhannya (beribadah) maupun dalam rangka berhubungan dengan sesamanya (bermuamalah). Sedangkan fikih merupakan penjelasan atau uraian yang lebih rinci dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah.

⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Al-Islam wa al-Hajah al-Insaniyyah Ilaih*. Terj. oleh A. Malik Madani dan Hamim Ilyas dengan judul "Islam Suatu Kajian Komprehensif". (Jakarta: Rajawali Pers, 1988), h. 31.

⁵ Al-Fairuzabadiy, *op. cit*, h. 1126.

⁶ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Qalam li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. 1978), h. 11.

Adapun istilah hukum Islam berasal dari dua kata dasar, yaitu ‘hukum’ dan ‘Islam’. Hukum bisa diartikan dengan peraturan dan undang-undang.⁷ Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa.⁸

Adapun kata yang kedua, yaitu ‘Islam’, adalah agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad saw. untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.⁹ Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw. untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’ itulah muncul istilah hukum Islam. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Islam.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa kata hukum Islam yang sering ditemukan pada literatur hukum yang berbahasa Indonesia secara umum mencakup syariah dan fikih, bahkan terkadang juga mencakup ushul fikih (dasar-dasar fikih). Namun, harus dipahami pula bahwa hukum Islam itu

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka.2001), h. 410.

⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Edisi 5 (Jakarta: Rajawali Pers.1996), h 38.

⁹ Mahmud Syaltut, *op. cit*, h 9.

tidak sama persis dengan syariah dan sekaligus tidak sama persis dengan fikih. Tetapi juga tidak berarti bahwa hukum Islam itu berbeda sama sekali dengan syariah dan fikih. Yang dapat dikatakan adalah pengertian hukum Islam itu mencakup pengertian syariah dan fikih, karena hukum Islam yang dipahami di Indonesia ini terkadang dalam bentuk syariah dan terkadang dalam bentuk fikih, sehingga kalau seseorang mengatakan hukum Islam, harus dicari dulu kepastian maksudnya, apakah yang berbentuk syariah ataukah yang berbentuk fikih. Hal inilah yang tidak dipahami oleh sebagian besar bangsa Indonesia, termasuk sebagian besar kaum Muslim, sehingga hukum Islam terkadang dipahami dengan kurang tepat, bahkan salah.

Hubungan antara syariah dan fikih sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Syariah merupakan sumber atau landasan fikih, sedangkan fikih merupakan pemahaman terhadap syariah. Secara umum syariah adalah hukum Islam yang bersumber dari Alqur'an dan Sunnah yang belum dicampuri daya nalar (Ijtihad), sedangkan fikih adalah hukum Islam yang bersumber dari pemahaman terhadap syariah atau pemahaman terhadap nash, baik Alqur'an maupun Sunnah. Asaf A.A. Fyze membedakan kedua istilah tersebut dengan mengatakan bahwa syariah adalah sebuah lingkaran yang besar yang wilayahnya meliputi semua perilaku dan perbuatan manusia; sedang fikih adalah lingkaran kecil yang mengurus apa yang umumnya dipahami sebagai tindakan umum. Syariah selalu mengingatkan kita akan wahyu, 'ilmu (pengetahuan) yang tidak akan pernah diperoleh seandainya tidak ada Alqur'an dan Sunnah dalam fikih ditekankan penalaran dan deduksi

yang dilandaskan pada ilmu terus-menerus dikutip dengan persetujuan. Jalan syariah digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya bangunan fikih ditegakkan oleh usaha manusia. Dalam fikih satu tindakan dapat digolongkan pada sah atau tidak sah, yajuzu wa ma la yajuzu (boleh atau tidak boleh). Dalam syariah terdapat berbagai tingkat pembolehan atau pelarangan. Fikih adalah istilah yang digunakan bagi hukum sebagai suatu ilmu sedang syariah bagi hukum sebagai jalan kesalehan yang dikaruniakan dari langit.¹⁰

B. Sumber Hukum Islam

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Alqur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Alquran dan Sunnah untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang berkewenangan dengan kedudukan dibawah Alqur'an dan Sunnah. Keotentikan sumber-sumber pembantu yang merupakan penjabaran dari Ijtihad hanyalah ditentukan dengan derajat kecocokannya dengan dua sumber utama hukum yang mula-mula dan tidak ditentang otoritasnya. Jika dirinci lebih khusus, yakni dalam arti syariah dan fikih sebagai dua konsep yang berbeda, maka sumber hukum bagi masing-masing berbeda. Syariah, secara khusus, bersumber kepada Alqur'an dan Sunnah semata, sedang fikih bersumber

¹⁰ Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition)*. (Delhi-Bombay-Calcutta-Madras: Oxford University Press. 1974), h. 21.

kepada pemahaman (ijtihad) manusia (mujtahid) dengan tetap mendasarkan pada dalil-dalil terperinci dari Alqur'an dan Sunnah.

Secara harfiah kata Alqur'an berasal dari bahasa Arab Alqur'an yang berarti pembacaan atau bacaan.¹¹ Sedang menurut istilah, Alqur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui Malaikat Jibril dengan menggunakan bahasa Arab sebagai hujjah (bukti) atas kerasulan Nabi Muhammad saw dan sebagai pedoman hidup bagi manusia serta sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan membacanya.¹²

Menurut Ahmad Hasan, Alqur'an bukanlah suatu undang-undang hukum dalam pengertian modern ataupun sebuah kumpulan etika. Tujuan utama Alqur'an adalah meletakkan suatu *way of life* yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan Allah. Alqur'an memberikan arahan bagi kehidupan sosial manusia maupun tuntunan berkomunikasi dengan penciptanya.¹³

Hukum perkawinan dan perceraian, hukum waris, ketentuan perang dan damai, hukuman bagi pencurian, pelacuran, dan pembunuhan, semuanya dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Selain aturan-aturan hukum yang khusus itu Alqur'an juga mengandung ajaran moral yang cukup banyak. Oleh karena itu, tidaklah benar kalau N.J. Coulson mengatakan bahwa tujuan utama Alqur'an bukanlah mengatur

¹¹ Ahmad Warson. Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta: PP. Al-Munawwir Krapyak. 1984), h 1185.

¹² Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit*, h 23.

¹³ Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*. Cetakan I (Delhi: Adam Publishers & Distributors. 1984), h. 39.

hubungan manusia dengan sesamanya, tetapi hubungan manusia dengan penciptanya saja.¹⁴

Bila dipahami secara mendalam, ternyata Allah tidak menurunkan Alqur'an dalam suatu kehampaan, tetapi sebagai suatu tuntunan bagi seorang Rasul yang hidup dan terlibat dalam suatu perjuangan yang nyata. Alqur'an lebih banyak memberikan prinsip-prinsip dasar yang membawa seorang Muslim pada arah tertentu dapat menemukan jawaban usahanya sendiri. Selanjutnya Alqur'an menyajikan hukum-hukum atau dasar-dasar Islam secara global yang sesuai dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah di segala tempat dan zaman. Jadi, bisa dikatakan bahwa Alqur'an adalah sebagai tuntunan (hidayat), dan bukan kitab hukum. Alqur'an menunjukkan dan menggariskan batas-batas dari berbagai aspek kehidupan. Tugas Nabi Muhammad saw. adalah untuk memberikan ukuran-ukuran kehidupan praktis yang ideal dalam sinaran batas-batas yang dinyatakan Alqur'an.

Sebenarnya perjalanan hukum Islam menempuh proses yang panjang. Penafsiran Alqur'an pada masa-masa awal tidaklah demikian rumit dan pelik sebagaimana masa-masa berikutnya. Metodologi pengambilan kesimpulan dari Alqur'an tumbuh semakin lama semakin rumit dan filosofis dengan dilakukannya kajian Alqur'an yang mendalam dan mendetail oleh para ahli hukum pada masa-masa berikutnya. Batang tubuh hukum Islam kaya akan contoh-contoh persoalan yang menjadikan para ulama berbeda pendapat di dalam mengambil dasar hukumnya, sebagian mereka mendasarkan pada

¹⁴ N. J. Coulson, *A History of Islamic Law*. (Edinburgh: Edinburgh University Press. 1964), h. 12.

Alqur'an dan sebagian yang lain mendasarkan pada Sunnah atau pendapat pribadinya, karena yang terakhir ini menganggap bahwa ayat-ayat Alqur'an yang diajukan tidak relevan dengan permasalahan yang sedang dibicarakan. Inilah yang kemudian membawa kepada terjadinya perbedaan pendapat dalam fikih Islam.

Perlu diketahui bahwa posisi Alqur'an sebagai sumber pertama dan terpenting bagi teori hukum tidaklah berarti bahwa Alqur'an menangani setiap persoalan secara jelimet (pelik) dan terperinci. Alqur'an, sebagaimana kita ketahui, pada dasarnya bukan kitab undang-undang hukum, tetapi merupakan dokumen tuntunan spiritual dan moral. Contoh-contoh yang sering dikutip oleh para orientalis, seperti yang diwakili oleh Schacht, lebih banyak berkaitan dengan kasus-kasus yang aplikasinya secara mendetail tidak diberikan oleh Alqur'an, seperti dalam hukum keluarga, hukum waris, bahkan cara-cara beribadah dan yang berhubungan dengan masalah ritual lainnya.¹⁵ Walaupun pada umumnya ayat-ayat Alqur'an yang menyangkut hukum bersifat pasti, tetapi selalu terbuka bagi penafsiran, dan aturan-aturan yang berbeda dapat diturunkan dari suatu yang sama atas dasar ijtihad. Inilah alasan bagi perbedaan pendapat diantara ahli hukum dalam kasus-kasus seperti yang disebut oleh Schacht.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kedudukan Alqur'an sebagai sumber utama hukum Islam berarti bahwa Alqur'an menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam Islam. Hal ini juga berarti bahwa

¹⁵ Joseph Schacht, *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*. (London: Oxford at the Clarendon Press. 1950), h. 55.

penggunaan sumber lain dalam Islam harus sesuai dengan petunjuk Alqur'an dan tidak boleh bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh Alqur'an.

Sumber hukum Islam yang kedua adalah sunnah. Secara etimologis, kata sunnah berasal dari kata berbahasa Arab al-sunnah yang berarti cara, adat istiadat (kebiasaan), dan perjalanan hidup (sirah) yang tidak dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Ini bisa dipahami dari sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim, "Barang siapa yang membuat cara (kebiasaan) yang baik dalam Islam, maka dia akan memperoleh pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya, dan barang siapa yang membuat cara yang buruk dalam Islam, maka dia akan memperoleh dosanya dan dosa orang yang mengikutinya".¹⁶

Sunnah pada dasarnya berarti perilaku teladan dari seseorang. Dalam konteks hukum Islam, Sunnah merujuk kepada model perilaku Nabi Muhammad saw. Karena Alqur'an memerintahkan kaum Muslim untuk mencontoh perilaku Rasulullah, yang dinyatakan sebagai teladan yang agung, maka perilaku Nabi menjadi 'ideal' bagi umat Islam (QS. al-Ahzab (33): 21 dan QS. al-Qalam (68): 4).

Secara terminologis, ada beberapa pemahaman tentang Sunnah. Menurut ahli hadist, Sunnah berarti sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. yang berupa perkataan, perbuatan, penetapan, sifat, dan perjalanan hidup beliau baik pada waktu sebelum diutus menjadi Nabi maupun sesudahnya.¹⁷

¹⁶ Munawwir, *op. cit.*, h. 716.

¹⁷ Muhammad 'Ajjaj al-Khathib, *Ulum al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu*. (Beirut: Dar al-Fikr. 1989), h. 19.

Alqur'an meminta kepada Rasulullah untuk memutuskan persoalan-persoalan yang dihadapi kaum Muslimin dengan dasar wahyu (QS. al-Maidah [5]: 48-49). Meskipun demikian, Alqur'an menyatakan bahwa Rasulullah adalah penafsir ayat-ayat Alqur'an (QS. al-Nahl [16]: 44). Selanjutnya Alqur'an menegaskan fungsi Rasulullah, yaitu mengumumkan wahyu kepada orang banyak, memberikan didikan moral kepada mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab suci dan kearifan atau hikmah (QS. Ali 'Imran [3]: 164). Alqur'an juga menjelaskan bahwa patuh dan cinta kepada Allah harus dibuktikan dengan patuh kepada Rasul dan sebaliknya durhaka kepada Rasul berarti durhaka kepada Allah (QS. Ali 'Imran [3]: 31-32; QS. al-Nisa' [4]: 80; dan QS. al-Ahzab [33]: 36). Dengan demikian, Sunnah terkait erat dengan Alqur'an, dan karenanya agak sulit untuk mengatakan bahwa keduanya adalah sumber yang terpisah. Sunnahlah yang memberikan bentuk konkrit pada ajaran-ajaran Alqur'an. Alqur'an misalnya menyebutkan perintah shalat dan zakat, tetapi tidak memberikan perinciannya. Nabi Muhammadlah yang menjelaskannya dalam bentuk praktik. Mengingat taat dan patuh kepada Nabi sebagai kewajiban, maka Sunnah, yaitu model perilaku dari Nabi baik dalam bentuk ajaran maupun contoh, menjadi sumber hukum. Istilah lain yang sering digunakan untuk menyebut Sunnah adalah hadist, dan terkadang digunakan juga istilah khabar dan atsar.

Bentuk Sunnah bisa bermacam-macam. Sesuai dengan definisinya, bentuk Sunnah ada tiga macam, yaitu ada yang berbentuk sabda Nabi (sunnah qauliyyah), ada yang berbentuk perilaku Nabi (sunnah fi'liyyah), dan ada

yang berbentuk penetapan Nabi atas perilaku sahabat (sunnah taqririyyah). Dari segi derajatnya, Sunnah ada yang shauhih, hasan, dan dla'if, bahkan ada yang maudlu' (Sunnah palsu). Sedang dilihat dari segi jumlah penyampainya, Sunnah ada yang mutaw tir, masyhur, dan ahad. Dan masih banyak lagi pembagian lain dari Sunnah atau hadist ini

Sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alqur'an, fungsi Sunnah adalah sebagai bayan atau penjelas terhadap Alqur'an. Fungsi bayan ini bisa berupa salah satu dari tiga fungsi, yaitu: 1) menetapkan dan menegaskan hukum-hukum yang ada dalam Alqur'an, seperti sabda Nabi tentang rukun Islam yang lima merupakan ketegasan dari firman Allah SWT. yang memerintahkan shalat, zakat, puasa, dan haji; 2) memberikan penjelasan arti yang masih samar dalam Alqur'an atau memerinci apa-apa yang dalam Alqur'an disebutkan secara garis besar (tafshil), mengkhususkan apa-apa yang dalam Alqur'an disebut dalam bentuk umum (takhshish), atau memberi batasan terhadap apa yang disampaikan Allah secara mutlak (taqyid), seperti perincian cara-cara shalat yang diberikan oleh Nabi yang merupakan penjelasan dari perintah melakukan shalat secara global dalam Alqur'an; 3) menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan oleh Alqur'an (tasyri'), seperti haramnya mengawini seorang perempuan sekaligus mengawini bibinya secara bersamaan.¹⁸

Seiring dengan dijadikannya Sunnah sebagai sumber hukum bagi kaum Muslim, maka pendapat dan praktik dari para sahabat pun banyak yang

¹⁸ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 39-40.

dijadikan sumber hukum, dengan alasan bahwa para sahabat adalah para pengamat langsung dari Sunnah Nabi. Karena mereka bertahun-tahun lamanya bersama Nabi, diharapkan mereka tentu mengetahui tidak hanya perkataan dan perilaku Nabi, tetapi juga ruh dan karakter dari 'Sunnah ideal' yang ditinggalkan Nabi bagi generasi selanjutnya.

Meskipun pendapat mereka berbeda-beda, tetapi tetap ada pada ruh Sunnah Nabi, dan dengan demikian tidak dapat dipisahkan dari Sunnah Nabi. Itulah sebabnya mengapa para ahli hukum mazhab-mazhab awal sering berargumentasi atas dasar keputusan-keputusan hukum para sahabat. Inilah yang biasa dilakukan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i misalnya.¹⁹

Generasi berikutnya, yaitu para tabi'in, juga memainkan peran yang penting dalam perkembangan hukum Islam, karena mereka memiliki hubungan dengan para sahabat. Keputusan-keputusan hukum mereka merupakan sumber hukum bagi mazhab-mazhab awal. Imam Malik, misalnya, mengutip praktik dan pendapat para tabi'in setelah mengutip Sunnah Nabi, dan begitu juga fuqaha' awal lainnya.

Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad. Secara etimologis, kata ijtihad berasal dari kata al-ijtihād yang berarti penumpahan segala upaya dan kemampuan atau berusaha dengan sungguh-sungguh (Munawwir, 1984: 234). Secara terminologis, ijtihad berarti mencurahkan kesanggupan dalam

¹⁹ Ahmad Hasan, *op. cit.*, h. 47-48.

mengeluarkan hukum syara' yang bersifat 'amaliyyah dari dalil-dalilnya yang terperinci baik dalam Alqur'an maupun Sunnah.²⁰

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Alqur'an, Sunnah, dan logika. Nash Alqur'an dan Sunnah sangat terbatas jika dibandingkan dengan banyaknya peristiwa yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga perlu ditetapkannya aturan baru untuk menghukumi semua permasalahan yang muncul dan belum diatur oleh Alqur'an dan Sunnah.

Pada prinsipnya ijtihad bisa digunakan dalam dua hal. *Pertama*, dalam hal-hal yang tidak ada nash-nya sama sekali. Dalam hal ini mujtahid dapat menemukan hukum secara murni dan tidak berbenturan dengan ketentuan nash yang sudah ada, karena memang belum ada nash-nya. *Kedua*, ijtihad dapat digunakan dalam hal-hal yang sudah diatur oleh nash, tetapi penunjukannya terhadap hukum tidak pasti (*zhanniy al-dalalah*). Nash hukum dalam bentuk ini bisa memberikan kemungkinan-kemungkinan pemahaman. Dalam hal ini ijtihad berperan didalam menemukan kemungkinan-kemungkinan tersebut. Cara atau metode yang ditempuh dalam rangka berijtihad bermacam-macam, yakni: *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *mashlahah mursalah*, *istishhab*, *'urf*, *mazhab shahabi*, dan *syar'u man qablana*.

C. Metode Menetapkan Hukum Islam

Problem dan permasalahan kehidupan manusia semakin hari kian bertambah kompleks dan beragam. Permasalahan-permasalahan yang awalnya dapat dicover secara eksplisit oleh kedua sumber pokok ajaran Islam tersebut,

²⁰ 'Abd al-Wahhab Khallaf, *op. cit.*, h. 216; lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabiyy. 1958), h. 379.

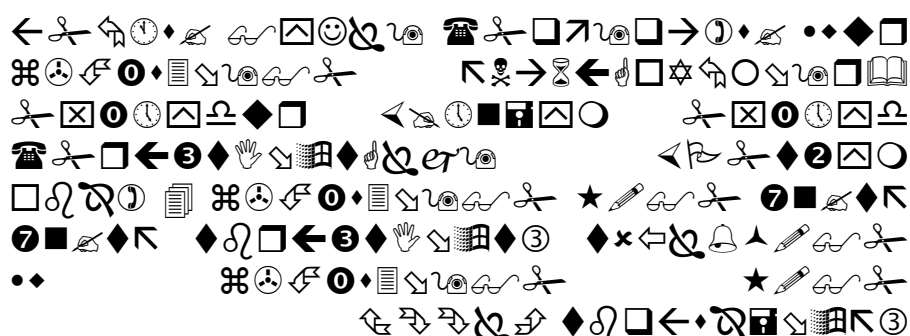
seiring dengan berjalannya waktu dan semakin kompleksnya permasalahan manusia, mulai bermunculan permasalahan-permasalahan yang belum ditemukan di dalam kedua sumber tersebut.

Di sinilah kita bisa melihat bahwa Islam didisain sedemikian rupa oleh Allah SWT sebagai agama pamungkas yang diturunkan-Nya di muka bumi ini. Ajaran-ajaran Islam tetap relevan sepanjang zaman dalam menjawab setiap permasalahan yang ada walaupun teks keagamaan secara kuantitatif tidak bertambah. Allah SWT tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama ajaran Islam dalam bentuk baku, final, dan siap pakai, yang menjawab secara rinci semua permasalahan yang ada baik yang telah, sedang, ataupun akan terjadi. Sebab jika demikian, ajaran Islam akan cepat usang dan hilang kemampuannya untuk merespon segala persoalan yang senantiasa berkembang dengan pesat.

Kondisi obyektif yang berkaitan dengan permasalahan manusia yang setiap saat bertambah banyak yang memerlukan tanggapan logis-yuridis dari *nash-nash* Al-Quran dan As-Sunnah yang belum tercover secara eksplisit dalam teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah, mewajibkan bagi orang-orang yang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad (usaha sungguh-sungguh untuk penggalian hukum) sebagai respon terhadap permasalahan yang baru muncul. Anugerah akal yang diberikan Allah SWT kepada manusia menjadikannya sebagai makhluk yang selalu ingin tahu, berkembang dan berinovasi. Melalui pranata ijtihad ini manusia dapat mengeksplorasi akal

pikirannya untuk mencari jawaban atas permasalahan baru dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah yang diperlukan dalam melakukan ijtihad.

Pencarian jawaban atas permasalahan baru ini membutuhkan *skill* dan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Dengan begitu ijtihad tidak bisa dilakukan dengan/oleh sembarang orang. Hanya orang yang memenuhi kriteria-kriteria dan syarat-syarat saja yang diperbolehkan. Kegiatan ijtihad tanpa mengindahkan syarat dan kriteria adalah tindakan membuat-buat hukum tanpa landasan yang jelas, itu sangat dicela oleh agama, bahkan membaca kekacauan dan kehancuran bagi agama. Sebagaimana diisyaratkan dalam Firman Allah SWT dalam surat Al-Nahl : 116



“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung”

Dalam menetapkan hukum Islam, masing-masing Ulama berpegang pada metode yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun demikian, secara umum tidak terdapat perbedaan yang signifikan diantara mereka. Diantara metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

Pertama, Istinbat. Istinbat adalah suatu kaidah dalam ushul fiqh, yaitu: menetapkan hukum dengan cara ijtihad atau, hal mengeluarkan hukum dari

dalil-dalil yang telah ditetapkan oleh syara. Ushul fiqh ialah ilmu yang menyelidiki bagaimana caranya dalil tersebut menunjukan hukum-hukum yang berhubungan dengan Mukalaf.²¹

Istinbat juga diartikan dengan:

استخراج المعانى من النصوص بفطر الذهن وقوة القريحة

“Mengeluarkan makna-makna dari nash-nash (yang terkandung) dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan (potensi) naluriah”.²²

Kedua, Ijtihad. Ijtihad menurut bahasa ialah “pengerahan segala kesanggupan untuk mengerjakan suatu yang sulit”. Sedangkan menurut istilah adalah menurut praktek para Sahabat, pengertian ijtihad ialah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul. Menurut mayoritas ulama ushul, pengertian ijtihad adalah pengerahan segala kesanggupan oleh seorang ahli fiqh atau mujtahid untuk memperoleh pengertian tingkat *zhann* mengenai suatu hukum syara.²³

Menurut Iman Ghazali (w. 505 H) adalah:

بذل المجتهد وسعة في طلب العلم باحكام الشرعية

“Pengerahan kemampuan oleh mujtahid dalam mencari pengetahuan tentang hukum syara”.²⁴

Menurut ilmu ushul fiqh, kata “ijtihad” identik dengan kata “istinbat”.

Jadi, arti ijtihad atau istinbat ialah salah satu metode untuk “menggali hukum

²¹ Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'iah AM, *kamus istilah fiqh*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. 1994), h. 129.

²² Totok jumantoro & Samsul Munir Amin. *Kamus ilmu ushul fiqh*. (Jakarta: Amzah. 2005), h. 142.

²³ Jalaludin rahmat. *Ijtihad dalam Sorotan*. (Bandung: Mizan, 1998). h. 23.

²⁴ Totok jumantoro & Samsul Munir Amin. *Op. cit*, h. 110.

syara' yang belum ditegaskan secara langsung oleh *nash* Al-Quran dan As-Sunnah.²⁵

Keabsahan ijtihad ini ditopang dengan hadist Nabi SAW:

...بما تقضى يا معاذ إذا عرض لك قضاء، قال : أقضى بكتاب الله، قال: فإن لم

:

“Hai Mu’adz, apa yang engkau lakukan jika dikemukakan kepadamu suatu perkara? Aku memutuskan dengan Kitab Allah, bagaimana jika tidak ditemukan didalam Al-Quran? Aku memutuskan dengan Sunnah Rasulullah SAW, bagaimana jika tidak ditemukan dalam Sunnah Rasul? Aku akan berijtihad dengan kesanggupan dan ketelitian”.

Jika melihat dari Sabda Nabi SAW tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara yang tidak ada jawabannya di Al-Quran ataupun As-Sunnah yaitu dengan cara berijtihad. Disini dijelaskan metode penemuan hukum dalam Islam melalui jalan berijtihad, antara lain:

a. *Ijma'*

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan makna Ijma' menurut arti istilah. Ini dikarenakan perbedaan mereka dalam meletakkan kaidah dan syarat Ijma'. Namun definisi Ijma' yang paling mendekati kebenaran adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad dari kalangan umat Muhammad setelah wafatnya beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam pada masa tertentu atas suatu perkara agama.²⁶

Syarat terbentuknya ijma' menurut syara' ada empat:

1. Adanya sebilangan para mujtahid pada waktu terjadinya suatu peristiwa, karena kesepakatan itu tidak dapat dicapai kecuali dengan

²⁵ Jalaludin rahmat. *Op. Cit*, h. 25.

²⁶ Syaikh Muhammad Siddiq Hasan Khan, *Al-Jami' li Ahkam Ushul Fiqih*, , h. 154.

beberapa pendapat, yang masing-masing diantaranya sesuai dengan lainnya.

2. Adanya kesepakatan semua mujtahid umat Islam atas suatu hukum syara' mengenai suatu peristiwa pada waktu terjadinya, tanpa memandang negeri mereka, kebangsaanya atau kelompoknya.
3. Adanya kesepakatan mereka itu dengan menampilkan pendapat masing-masing mereka secara jelas mengenai suatu kejadian, baik penampilan itu berupa ucapan atau perbuatan atau penampilan pendapat menjatuhkan secara menyendiri.
4. Dapat direalisasikan kesepakatan dari semua mujtahid atas suatu hukum.

Ijma' dapat dijadikan sebagai dasar hukum atau dipastikan kehujujahanannya sesuai dengan firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah, dan Ulil Amri di antara kamu”.

Lafal *Amri* artinya ialah hal atau keadaan, dan ia umum, yang meliputi hal-hal duniawi. Dan Ulil Amri duniawi ialah para raja, pemimpin dan penguasa. Sedangkan ulil amri agamawi ialah para mujtahid dan ahli fatwa agama (hukum).

b. *Qiyas*

Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya,

dalam hukum yang telah ditetapkan oleh karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam illat hukumnya.

Adapun syarat-syarat qiyas adalah:

1. Al-Ashlu (suatu perkara yang ada hukumnya dalam nash)
2. Al-Far'u (suatu perkara yang belum ada hukumnya di dalam nash)
3. Hukum Ashal (hukum dari perkara *al-Ashlu*)
4. *Illat*

c. *Istihsan*

Menurut bahasa artinya menganggap baik sesuatu, sedangkan menurut istilah Ulama Ushul ialah berpindahnya seorang mujtahid dari tuntunan Qiyas jail kepada Qiyas Khafi. Atau dari hukum kulli kepada hukum pengecualian, karena ada dalil yang menyebabkan mencela akalunya, dan dimenangkan baginya perpindahan ini. Jadi apabila terjadi sesuatu kejadian dan tidak terdapat nash mengenai hukumnya, maka untuk membicarakan hal itu ada dua segi yang bertentangan, yaitu:

Pertama : Segi nyata yang menghendaki suatu hukum

Kedua : Segi tersembunyi yang menghendaki hukum lain

Dan pada mujtahid sendiri sudah terdapat dalil yang memenangkan segi pandangan secara tersembunyi, maka perpindahan dari segi pandangan yang nyata inilah yang menurut syara' disebut dengan istihsan.

Para Ulama yang menggunakan hujjah istihsan, ialah kebanyakan Ulama Hanafiyah. Dalil mereka atas kehujjahannya yaitu bahwasanya

mengambil dalil dengan istihsan itu hanyalah istidlal dengan Qiyas khafi yang menang atas Qiyas jail dengan dalil yang menuntut kemenangannya, atau istidlal dengan *maslaha mursalah* (kepentingan umum) atas pengecualian bagian hukum kulli. Semua ini adalah istidlal yang sah.

Terdapat sebuah kelompok mujtahid yang menentang istihsan dan menganggapnya sebagai istinbat hukum syara dengan kemauan hawa nafsu dan rasa enak. Pimpinan kelompok ini adalah Imam Syafi'I, hal mana telah dinukil dari padanya, bahwa ia berkata : "siapa melakukan istihsan berarti ia telah membentuk syari'at. Artinya orang tersebut memulai hukum syari'at dirinya sendiri.

d. *Al-Maslahah al-Mursalah*

Menurut Ulama Ushul yaitu, masalah dimana syar'i tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Adapun syarat-syarat menjadikan Hujjah Maslahah al-Mursalah adalah sebagai berikut:

- a) Berupa masalah yang sebenarnya, bukan masalah yang bersifat dugaan.
- b) Berupa masalah yang umum, bukan masalah yang bersifat perorangan
- c) Pembentukan hukum bagi masalah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh nash atau Ijma.

e. *Al-'Urf*

'Urf adalah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya dan atau hal meninggalkan sesuatu juga disebut adat.

'Urf itu ada dua macam, yaitu 'Urf shohih dan 'Urf fasid. 'Urf shohih adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia dan tidak pula bertentangan dengan syara'. Sedangkan 'Urf fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal oleh manusia tetapi bertentangan dengan syara'.

Hukum dari 'Urf shohih adalah harus dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam pengadilan. Bagi seorang Mujtahid harus memeliharanya dalam waktu membentuk hukum. Seorang Qhadi juga harus memeliharanya ketika mengadili.

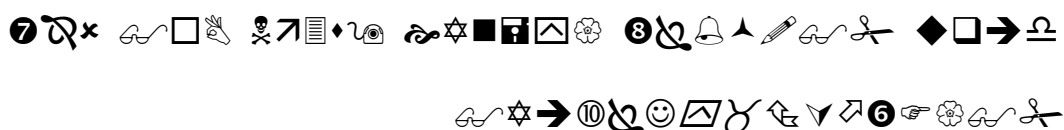
Ulama berkata, "Adat itu adalah syari'at yang dikukuhkan sebagai hukum". Imam Malik mendasarkan sebagian hukumnya kepada amal perbuatan penduduk Madinah. Imam Abu Hanifah bersama-sama muridnya berbeda pendapat dalam beberapa hukum dengan dasar atas perbedaan 'Urf mereka. Bahkan Imam Syafi'i mengubah sebagian hukum yang telah menjadi pendapatnya (ketika di Baghdad) ketika telah berada di Mesir, dikarenakan perbedaan 'Urf.

f. *Al-Istishhab*

Menurut bahasa Arab ialah : mengakui adanya hubungan perkawinan. Sedangkan menurut istilah Ulama Ushul, yaitu menetapkan sesuatu menurut keadaan sebelumnya sehingga terdapat dalil

menunjukkan perubahan keadaan, atau menjadikan hukum yang telah ditetapkan pada masa lampau secara kekal menurut keadaan sehingga terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya.

Dan apabila seorang Mujtahid ditanya tentang hukum binatang atau benda-benda, atau tumbuh-tumbuhan, atau makanan dan minuman apa saja, atau suatu amal, dan ia tidak menemukan dalil syara' mengenai hukumnya, maka dihukumi atas kebolehan, karena kebolehan itu adalah pangkal (asal), dan tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas perubahannya. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al- Baqarah 29 :



“Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”

Istishhab adalah akhir dalil syara' yang dijadikan tempat kembali seorang Mujtahid untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya, karena Ulama Ushul berkata, “Sesungguhnya istishhab adalah akhir tempat beredar fatwa”, yaitu mengetahui atas sesuatu menurut hukum yang telah ditetapkan baginya selama tidak terdapat dalil yang mengubahnya. Ini adalah teori dalam pengambilan dalil yang telah menjadi kebiasaan dan tradisi manusia dalam segala pengelolaan dan ketetapan mereka.

g. *Syariat Orang Sebelum Kita*

Apabila al-Quran dan al-Sunnah itu telah diisytarkan oleh Allah kepada para ummatnya yang telah mendahului kita melalui para Rasul-Nya, dan telah di-*nash*-kan bahwasanya syariat itu diwajibkan kepada kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak ada perselisihan bahwa syariat itu adalah syariat untuk kita dan undang-undang yang wajib diikuti dengan menetapkan syariat kita kepadanya. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 45, yang artinya:

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka pun ada qishosnya”.

Maka Jumhur Ulama Hanafiyah, dan sebagian Ulama Malikiyah, serta sebagian Ulama Syafi’iyah berkata, “Bahwasanya hukum itu adalah syari’at untuk kita, dan kita wajib mengikuti dan menerapkannya selama hukum itu telah diceritakan kepada kita, dan dalam hukum kita tidak terdapat yang menasakhnya.

D. Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam

Sejarah hukum Islam, sekilas penulis mulai dari era Rasulullah saw berada di Madinah, dalam sejarah mencatat bahwa Rasulullah saw hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Ada dua aktivitas yang sangat penting yang beliau lakukan setibanya di Madinah, yaitu mendirikan masjid di Quba dan city-state di Madinah. Dua peristiwa itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad saw telah melaksanakan dua macam doktrin Islam yang pokok

yaitu hubungan manusia dengan Allah swt dan hubungan manusia dengan manusia.²⁷

Perilaku Nabi Muhammad pada permulaan periode Madinah itu membuktikan bahwa sejak semula Islam mempertautkan dengan erat antara agama dan negara.²⁸

Sebagai kepala negara untuk setiap keputusan yang beliau tetapkan, Nabi Muhammad saw selalu melakukan musyawarah atau syura dengan para sahabat. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah asy-Syura/42:38 dan surah Ali Imran/3:159. Beliau senantiasa menerapkan syura sebagai jalan dalam memberikan keputusan perbagai masalah yang berkembang pada masa itu sesuai yang digariskan dalam al-Qur'an. Salah satu contoh yang terkenal dalam sejarah Islam ialah ketika Madinah diserang oleh orang-orang Quraisy dari Mekkah dalam perang di bukit Uhud dekat kota Madinah.²⁹

Nabi Muhammad saw sebagai kepala negara Madinah telah menerapkan dengan sukses prinsip-prinsip nomokrasi Islam sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.³⁰ Demikian besar perhatian beliau terhadap masyarakat Madinah khususnya terhadap orang non muslim, beliau mengingatkan agar orang muslim tidak memusuhi golongan dzimmi, karena keselamatan dan keamanan mereka menjadi tanggung jawab Kepala Negara.

²⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Kencana, 2007), h. 157.

²⁸ Abdul Malik A. al-Sayed, "Social Ethics of Islam", dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Impementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Kencana, 2007), hlm., 158.

²⁹ *Ibid*, h. 158-159.

³⁰ Muhammad Tahir Azhary, *op.cit*, h. 85-86.

Kedudukan mereka di mata hukum adalah sama seperti halnya warga negara lain yang beragama islam sebagaimana yang telah diatur dalam Konstitusi Madinah ditegaskan bahwa kelompok minoritas yahudi adalah bagian dari negara Madinah dan wajib dilindungi oleh negara. Dalam bidang hukum kepada mereka diberlakukan hukum Taurat, karena ini merupakan hak mereka.³¹

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip nomokrasi islam tersebut, Nabi Muhammad tidak mengalami sesuatu hambatan karena :

1. Nabi Muhammad sebagai tokoh panutan (*uswatun hasanah*) secara pribadi senantiasa memberikan contoh atau teladan kepada pengikutnya tentang setiap hal yang diajarkan.
2. Karakter Nabi sebagai Kepala Negara Madinah ketika itu selalu mencerminkan sikap dan watak sebagai pemimpin yang demokrat dan berwibawa sesuai dengan moral atau akhlak Islam dan selalu mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi atau kepentingan keluarga.
3. Kesadaran rakyat sangat tinggi terhadap kewajiban dan hak-hak mereka. Dalam praktek setiap orang berhak menghadap langsung dan bertemu dengan Kepala Negara tanpa sesuatu prosedur yang rumit.

Inilah sekelumit sejarah Nabi Muhammad saw yang membawa Islam menjadi rahmatan lil 'alamin diteruskan oleh para sahabat-sahabatnya dengan moral atau akhlak Islam sampai pada akhirnya menyebar ke segala penjuru

³¹ *Ibid*, h. 164.

dunia, hingga masuk ke bumi pertiwi Indonesia dan diterima oleh masyarakat Indonesia secara damai sampai masa kini.

E. Karakteristik Hukum Islam

a. Penerapan Hukum Bersifat Universal

Sebagian besar dari nash-nash Alqur'an tampil dalam bentuk prinsip-prinsip dasar yang universal dan ketetapan hukum yang bersifat umum. Ia tidak bicara mengenai bagian-bagian kecil, rincian-rincian secara mendetail.³² Oleh karena itu, ayat-ayat Alqur'an sebagai petunjuk yang universal dapat dimengerti dan diterima oleh umat dimanapun juga di dunia ini tanpa harus diikat oleh tempat dan waktu.

b. Hukum yang Ditetapkan oleh Alqur'an tidak Pernah Memberatkan

Dalam Alqur'an tidak ada satupun perintah-perintah Allah yang memberatkan hamba-Nya. Apabila Tuhan melarang manusia mengerjakan sesuatu pasti ada maksudnya baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Walaupun demikian manusia itu diberikan kelonggaran dalam keadaan tertentu. Contoh tetang hukum memakan bangkai merupakan hal yang terlarang namun dalam keadaan terpaksa yakni tidak ada makanan lain dan orang akan mati kelaparan. Karenanya maka bangkai boleh saja dimakan. Ini berarti hukum Islam bersifat elastis dan dapat berubah sesuai dengan persoalan waktu dan tempat.

c. Menetapkan Hukum Bersifat Realitas³³

³² Yusuf al-Qardhawy, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam* (Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1992), h. 24.

³³ Lihat Q.S. Al-Maidah : 101.

Hukum Islam ditetapkan berdasarkan realitas dalam hal ini harus berpandangan riil dalam segala hal. Menghayalkan perbuatan yang belum terjadi lalu menetapkan suatu hukum tidak diperbolehkan. Dengan dugaan ataupun sangkaan-sangkaan tidak dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Dr. Said Ramadhan menjelaskan bahwa hukum Islam mengandung metode of realism.³⁴

d. Menetapkan Hukum Berdasarkan Musyawarah sebagai Bahan Pertimbangan

Kalau hukum diibaratkan sebagai isi, maka masyarakat adalah wadahnya. Untuk menerangkan isi haruslah dilihat wadahnya. Hal inilah yang terlihat dalam proses diturunkannya ayat-ayat Alqur'an yang menggambarkan kebijaksanaan Tuhan dalam menuangkan isi yang berupa hukum Islam ke dalam wadahnya yang berupa masyarakat.³⁵

e. Sanksinya Didapatkan di Dunia dan di Akhirat

Undang-undang memberikan sanksi atas pelanggaran terhadap hukum-hukumnya. hanya saja sanksi itu selamanya hanya diberikan di dunia, berbeda halnya dengan hukum Islam yang memberi sanksi di dunia juga di akhirat. Sanksi di akhirat selamanya lebih berat dari pada yang di dunia. Karena itu, orang yang beriman merasa mendapatkan dorongan kejiwaan yang kuat untuk harus melaksanakan hukum-

³⁴ Said Ramadhan, *Islamic Law* (London: Mac Millan Limited, 1961), h. 57.

³⁵ Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan, dan Keadilannya* (Cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 126.

hukumNya dan mengikuti perintah serta menjauhi larangan-laranganNya.³⁶

Hukum yang disandarkan pada agama seperti ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan individu dan masyarakat. Tidak diragukan lagi ini adalah tujuan yang bermanfaat hanya saja ia bermaksud membangun masyarakat ideal yang bersih dari semua apa yang bertentangan dengan agama dan moral.³⁷

³⁶ Muhammad Yusuf Musa, *Islam Suatu Kajian Komprehensif* (Cet. I Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 167.

³⁷ *Ibid.* h. 167.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPLANTASI

A. Pengertian Transplantasi

Transplantasi berasal dari bahasa Inggris *to transplant*, yang berarti *to move from one place to another*, bergerak dari satu tempat ke tempat lain.¹ Sedangkan dalam Bahasa Arab transplantasi disebut dengan *Naqlu Al-A' da, zira'a al-a'dai'i*.²

Definisi yuridis transplantasi dalam PP No 18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia, pasal 1 huruf e adalah “Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan dan atau jaringan tubuh manusia yang berasal dari tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat dan atau jaringan tubuh manusia yang tidak berfungsi dengan baik”.³

Adapun pengertian menurut ahli Ilmu Kedokteran, transplantasi ialah pemindahan jaringan atau organ tubuh dari satu tempat ke tempat lain.⁴ Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, pengertian transplantasi organ adalah penggantian organ tubuh atau anggota badan yang rusak atau tidak normal

¹ A.S Homby, SC.,, *The Advance Learner's Dictionary of Current English*, h. 1075.

² Ahmad Muhammad Kan'an, *Al-Mausu'atu At-Thibbiyah Al-Fiqhiyah*, (Beirut : Dar Al Nafa'is, t.t) h. 713.

³ Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003), h. 27.

⁴ H. Baried Ishom, *Dasar Pengertian Tentang Transplantasi*, Ceramah di hadapan sidang majelis *Tarjih Muhammadiyah* 8-9-1979 di Medan, dalam www.muhamadiyah.com.

supaya dapat berfungsi secara normal atau sesuai dengan fungsinya masing-masing.⁵

Robert Woworuntu dalam bukunya *Kamus Kedokteran dan Kesehatan* transplantasi berarti : Pencangkokan.⁶ Dalam Kamus Kedokteran DORLAND dijelaskan bahwa transplantasi berasal dari transplantation (trans-+.plantare: menanam) berarti : penanaman jaringan yang diambil dari tubuh yang sama atau dari individu lain. Adapun *transplant* berarti : 1. Mentransfer jaringan dari satu bagian ke bagian lain. 2. Organ atau jaringan yang diambil dari badan untuk ditanam ke daerah lain pada badan yang sama atau ke individu lain.

Jadi, menurut terminologi kedokteran “transplantasi” berarti; “suatu proses pemindahan atau pencangkokan jaringan atau organ tubuh dari suatu atau seorang individu ke tempat yang lain pada individu itu atau ke tubuh individu lain”. Dalam dunia kedokteran jaringan atau organ tubuh yang dipindah disebut graft atau transplant; pemberi *transplant* disebut donor; penerima *transplant* disebut *kost* atau *resipien*.⁷

B. Sejarah Transplantasi

Transplantasi jaringan mulai dipikirkan oleh dunia sejak 4000 tahun silam menurut manuscip yang ditemukan di Mesir memuat uraian mengenai eksperimen transplantasi jaringan yang pertama kali dilakukan di Mesir sekitar 2000 tahun sebelum diutusnya Nabi Isa as. Sedang di India beberapa puluh tahun sebelum lahirnya Nabi Isa as. seorang ahli bedah bangsa Hindu

⁵ DEPDIKNAS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002) h.192.

⁶ Robert Woworuntu, *Kamus Kedokteran dan Kesehatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 1993), h. 327.

⁷ Dirjen Pendidikan Islam, “Masalah Transplantasi, Euthanasia dan Musik dan Nyanyian”, dalam *Modul 7; Masail Fiqh al-Haditsah*, (Jakarta : Dirjen Pendis, 2001), h. 234.

telah berhasil memperbaiki hidung seorang tahanan yang cacat akibat siksaan, dengan cara mentransplantasikan sebagian kulit dan jaringan lemak yang diambil dari lengannya. Pengalaman inilah yang merangsang Gaspare Tagliacosi, seorang ahli bedah Itali, pada tahun 1597 M untuk mencoba memperbaiki cacat hidung seseorang dengan menggunakan kulit milik kawannya.

Pada ujung abad ke-19 M para ahli bedah, baru berhasil mentransplantasikan jaringan, namun sejak penemuan John Murphy pada tahun 1897 yang berhasil menyambung pembuluh darah pada binatang percobaan, barulah terbuka pintu percobaan mentransplantasikan organ dari manusia ke manusia lain. Percobaan yang telah dilakukan terhadap binatang akhirnya berhasil, meskipun ia menghabiskan waktu cukup lama yaitu satu setengah abad. Pada tahun 1954 M. Dr. J.E. Murray berhasil mentransplantasikan ginjal kepada seorang anak yang berasal dari saudara kembarnya yang membawa perkembangan pesat dan lebih maju dalam bidang transplantasi.

Tatkala Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, ilmu bedah sudah dikenal diberbagai negara dunia, khususnya negara-negara maju saat itu, seperti dua negara adi daya Romawi dan Persia. Namun pencangkokan jaringan belum mengalami perkembangan yang berarti, meskipun sudah ditempuh berbagai upaya untuk mengembangkannya. Selama ribuan tahun setelah melewati bantak eksperimen barulah berhasil pada akhir abad ke-19 M, untuk pencangkokan jaringan, dan pada pertengahan abad ke-20 M untuk

pencangkokan organ manusia. Dimasa Nabi saw negara Islam telah memperhatikan masalah kesehatan rakyat, bahkan senantiasa berupaya menjamin kesehatan dan pengobatan bagi seluruh rakyatnya secara cuma-cuma. Ada beberapa dokter ahli bedah di masa Nabi yang cukup terkenal seperti alHarth bin Kildah dan Abu Ramtah Rafa'ah, juga Rafidah al Aslamiyah dari kaum wanita.

Meskipun pencangkokan organ tubuh belum dikenal oleh dunia saat itu, namun operasi plastik yang menggunakan organ buatan atau palsu sudah dikenal di masa Nabi saw., sebagaimana yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari Abdurrahman bin Tharfah (Sunan Abu Dawud, hadits. no.4232) “bahwa kakeknya ‘Arfajah bin As’ad pernah terpotong hidungnya pada perang Kulab, lalu ia memasang hidung (palsu) dari logam perak, namun hidung tersebut mulai membau (membusuk), maka Nabi saw. menyuruhnya untuk memasang hidung (palsu) dari logam emas”. Imam Ibnu Sa’ad dalam Thabaqatnya (III/58) juga telah meriwayatkan dari Waqid bin Abi Yaser bahwa ‘Utsman (bin ‘Affan) pernah memasang mahkota gigi dari emas, supaya giginya lebih kuat (tahan lama).

Pada periode Islam selanjutnya berkat doktrin Islam tentang urgensi kedokteran mulai bertebaran karya-karya monumental kedokteran yang banyak memuat berbagai praktek kedokteran termasuk transplantasi dan sekaligus mencuatkan banyak nama besar dari ilmuwan muslim dalam bidang kesehatan dan ilmu kedokteran, diantaranya adalah; Al-Rozy (Th.251-311 H.) yang telah menemukan dan membedakan pembuluh vena dan arteri

disamping banyak membahas masalah kedokteran yang lain seperti, bedah tulang dan gips dalam bukunya Al-Athibba.

Lebih jauh dari itu, mereka bahkan telah merintis proses spesialisasi berbagai kajian dari suatu bidang dan disiplin. Az-Zahrawi ahli kedokteran muslim yang meninggal di Andalusia sesudah tahun 400-an Hijriyah telah berhasil dan menjadi orang pertama yang memisahkan ilmu bedah dan menjadikannya subjek tersendiri dari bidang Ilmu Kedokteran. Beliau telah menulis sebuah buku besar yang monumental dalam bidang kedokteran khususnya ilmu bedah dan diberi judul “At-tashrif”.

Buku ini telah menjadi referensi utama di Eropa dalam bidang kedokteran selama kurang-lebih lima abad dan sempat diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia termasuk bahasa latin pada tahun 1497 M. Dan pada tahun 1778 M. Dicetak dan diterbitkan di London dalam versi arab dan latin sekaligus. Dan masih banyak lagi nama-nama populer lainnya seperti Ibnu Sina (Lihat, Dr.Mahmud Alhajj Qasim, Atthibb ‘indal ‘arab wal muslimin hal: 105, Al-Ward, Mu’jam ‘Ulama al-A’rab I / 144).

C. Proses Transplantasi

Dalam transplantasi perlu diperhatikan tahapan dimulainya transplantasi dan sifat organ atau jaringan yang ditransplantasikan. Sifat organ atau jaringan yang ditransplantasikan antara dua spesies tergantung pada faktor biologis. Satu organ harus dikeluarkan dari badan manusia yang tidak terkontaminasi dengan bakteri atau virus.

Organ yang dipakai untuk transplantasi harus diambil dari manusia dengan batang otak yang sudah mati, tapi dengan sirkulasi yang masih baik atau dengan sirkulasi yang baru saja berhenti. Pada saat sirkulasi pendarahan, organ yang akan dicangkokkan berhenti, organ tersebut dimasukkan ke dalam larutan fisiologis yang dingin. Serta pembuluh darah *diperfusi* dengan larutan *elektrolit* yang dingin yang berisi komposisi *ion* dan tekanan *osmotik* serupa dengan cairan *intra selluler*. Organ dimasukkan ke dalam ruangan steril yang dikelilingi oleh air es. Ginjal akan dapat bertahan selama 24 jam, jantung paruparu -6 jam, pankreas juga 10 jam.

Bena serta *drainase ureter* secepat mungkin harus dikembalikan seperti semula. Penanggulangan *immuno supressif* anti penolakan jaringan harus dimulai langsung sesudah operasi. Biasanya dengan dosis rendah *azathioprine*, *cylosporine A* dan *steroid*. Dengan penentuan fungsi ginjal setiap hari dapat diketahui reaksi penolakan sedini mungkin dan ini dikonfirmasi dengan melakukan *biopsy needle* dari ginjal transkutan. Bila ada penolakan *sellurer* biasanya ini dapat ditanggulangi dengan memberikan dosis yang besar dari *steroid* atau *antibody monoclonal*.⁸

D. Transplantasi Dalam Dunia Kedokteran

Sebelum pada penjelasan proses pencangkokan organ tubuh, perlu dibahas tentang makna dari donor, resipien dan organ tubuh. Yang dimaksud dengan donor adalah orang yang menyumbangkan organ tubuhnya yang masih sehat untuk dipasangkan pada orang lain yang organ tubuhnya sakit

⁸ Harold Ellis & Sir Roy Calne, *Ilmu Bedah Umum*, (Jakarta:Grafindo, 1997), h. 342-344.

atau terjadi kelainan. Sedangkan resipien adalah orang yang menerima jaringan atau organ yang dicangkokkan.⁹

Yang dimaksud dengan organ tubuh adalah kumpulan jaringan yang memiliki fungsi berbeda-beda yang membentuk suatu kesatuan sehingga memiliki kekuatan fungsi tertentu, seperti jantung, hati dan lain-lain. Dalam praktek pencangkokan organ tubuh, organ atau jaringan yang dicangkok itu adakalanya diambil dari tubuh orang lain dan ada pula yang diambil dari hewan. Maka pencangkokan organ tubuh dilihat dari segi hubungan genetic antara donor dan resipien dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Auto transplantasi, yaitu transplantasi yang resipien dan donornya adalah satu individu. Jadi organ atau jaringan itu diambil dari tubuh sendiri.
2. Homo transplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang sejenis. Jadi organ atau jaringan itu dicangkok dari tubuh orang lain. Pada homo transplantasi, adakalanya donornya dari orang yang masih hidup (*cadaver donor*) dan adakalanya orang yang sudah meninggal (*living donor*).
3. Hetero transplantasi, yaitu pencangkokan yang resipien dan donornya adalah dua individu yang berbeda jenisnya. Misalnya resipiennya manusia sedangkan donornya adalah hewan.¹⁰

⁹ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 163.

¹⁰ A. Munir, *Hukum Islam Tentang Transplantasi dan Bedah Kosmetik* (Makalah disampaikan pada kajian 31 Mei 2008 oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PW Muhammadiyah Jatim).

Secara hukum yang tersebut secara implisit pada pasal 10 ayat 1 PP 18 tahun 1981 transplantasi organ yang di izinkan untuk manusia ada dua kategori transplantasi yaitu:

- a. Tansplantasi Autologus : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain pada manusia yang sama.
- b. Transplantasi Homologous : yaitu pemindahan organ tubuh dari satu orang kepada orang yang lain, donor bisa masih hidup atau sudah meninggal.

Berkaitan dengan donor, pencangkokan dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu :¹¹

1. Donor dalam Keadaan Hidup Sehat

Pada pencangkokan semacam ini diperlakukan seleksi yang cermat dan harus diadakan pemeriksaan kesehatan yang lengkap dan menyeluruh baik terhadap donor maupun resipien. Ini dilakukan untuk menghindari kegagalan transplantasi yang disebabkan adanya penolakan tubuh resipien dan juga untuk mencegah resiko bagi donor.¹²

2. Donor dalam keadaan hidup koma

Apabila donor dalam keadaan koma atau diduga kuat akan meninggal, maka dalam pengambilan organ tubuh donor memerlukan alat kontrol dan penunjang kehidupan. Kemudian alat-alat penunjang kehidupan tersebut dicabut, setelah proses pengambilan organ tubuhnya.

¹¹ Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih Kontemporer*,(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997). h. 228. Lihat juga Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kobtemporer*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), 121-122.

¹² Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*,(Jakarta:Grafindo, 1996), h. 117.

Yang perlu diperhatikan adalah kriteria mati secara medis atau klinis dan yuridis perlu ditentukan dengan tegas. Apakah kriteria meninggal itu ditandai dengan berhentinya denyut jantung dan pernafasan, sebagaimana rumusan PP No.18/1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia atau ditandai dengan berhentinya fungsi otak, seperti pada rumusan kongres Ikatan Dokter Indonesia tahun 1985.

Penegasan kriteria ini sangat penting bagi dokter sebagai pegangan dalam menjalankan tugasnya, sehingga ia tidak khawatir dituntut melakukan pembunuhan berencana oleh keluarga yang bersangkutan sehubungan dengan praktek pencangkokan.¹³

3. Donor dalam keadaan meninggal

Keadaan ini merupakan keadaan yang paling ideal untuk melakukan donor. Organ tubuh yang akan dicangkokkan diambil ketika donor sudah meninggal berdasarkan ketentuan medis dan yuridis. Secara medis memandang kematian sesungguhnya masalah yang sudah pasti terjadi. Akan tetapi pengertian tentang kematian secara medis itu sendiri mengalami perkembangan dari waktu ke waktu sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Kematian dapat dibagi menjadi 2 fase, yaitu: *somatic death* (kematian Somatik) dan *biological death* (kematian Biologik).

¹³ Masfjuk Zuhdi, *op. cit.* h. 84-85.

Pertama, Kematian somatik merupakan fase kematian tanpa adanya tanda kehidupan seperti denyut jantung, gerakan pernafasan, suhu badan yang menurun dan tidak adanya aktifitas listrik otak pada rekaman EEG. Dalam waktu 2 jam, kematian somatik akan diikuti fase kematian biologic yang ditandai dengan kematian sel.

Kurun waktu 2 jam diantaranya dikenal sebagai fase mati suri. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan seperti alat respirator (alat Bantu nafas), seseorang yang dikatakan mati batang otak yang ditandai dengan rekaman EEG yang datar, masih bisa menunjukkan aktifitas denyut jantung, suhu badan yang hangat, fungsi alat tubuh yang lain seperti ginjal pun masih berjalan sebagaimana mestinya, selama dalam bantuan alat respirator tersebut.

Tetapi, begitu alat respirator tersebut di hentikan, maka dalam beberapa menit akan diikuti tanda-tanda kematian somatik lainnya. Walaupun tanda-tanda kematian somatik sudah ada, sebelum terjadi kematian biologi, masih dapat dilakukan berbagai macam tindakan seperti pemindahan organ tubuh untuk transplantasi, kultur sel, ataupun jaringan dan organ atau jaringan tersebut masih akan hidup terus, walaupun berada pada tempat yang berbeda selama mendapat perawatan yang memadai. Jadi dengan demikian semakin sulit seorang ilmuan medic menentukan kematian pada manusia.¹⁴

Menurut Amir, kematian secara yuridis adalah :

¹⁴ Rio Christiawan, *op. cit*, , h..37.

1. Mati sebagai berhentinya darah mengalir : konsep ini bertolak dari kriteria mati berupa berhentinya jantung, organ yang memompa darah mengalir ke seluruh tubuh. secara yuridis dalam PP No.18 tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis serta transplantasi alat atau jaringan tubuh manusia, dinyatakan bahwa mati adalah berhentinya fungsi jantung dan paru-paru.
2. Mati sebagai saat terlepasnya nyawa dari tubuh : nyawa terlepas dari tubuh ketika darah berhenti mengalir
3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanent : dalam pengertian ini, fungsi organ tubuh yang semula bekerja secara terpadu kini berfungsi sendiri-sendiri tanpa terkendali karena fungsi otak sudah rusak dan tidak mampu mengendalikan lagi.

Secara yuridis jika seorang manusia yang dinyatakan mati maka ia akan kehilangan hak otonominya karena otonomi manusia sebagai makhluk yang bebas tidak dapat lepas dari relasinya terhadap sesama. Pengertian kematian menurut PP No.18 tahun 1981 pasal 1 huruf g: meninggal dunia adalah keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa fungsi otak, pernafasan dan atau denyut jantung seseorang telah berhenti.¹⁵

Secara eksplisit dalam PP No 18 tahun 1981 yang dipersyaratkan untuk transplantasi pada donor meninggal adalah selain kematian jantung dan paru-paru yang telah diurai diatas dan kematian batang otak yaitu tidak

¹⁵ PP No 18 tahun 1981 di www.metronews.com, pada tanggal 10 Maret 2013.

sanggup menerima rangsangan dari luar dan tidak ada reaksi atas rangsangan, tidak ada gerak spontan atau pernafasan, tidak ada refleksi dan situasi ini dibuktikan oleh *Elektro Ensefalogram* (EEG).¹⁶

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah daya tahan organ yang akan di transplantasikan, apakah masih ada kemungkinan untuk bisa berfungsi bagi resipien.¹⁷

Secara yuridis (sesuai dengan deklarasi geneva 1948) transplantasi organ tubuh manusia boleh dilakukan jika:

1. Transplantasi merupakan upaya terakhir dalam pengobatan
2. Tujuan utamanya bersifat klinis dan bukan eksperimental
3. Pelaksanaanya prosedural dan proporsionalitas artinya, tidak hanya mempertimbangkan kualitas kehidupan tetapi mempertimbangkan juga fisibilitas medis
4. Transplantasi merupakan tindakan medik yang beresiko tinggi, oleh karena itu tindakan medik transplantasi dilakukan oleh sebuah tim yang minimal terdiri dari dokter spesialisasi bedah dengan sub spesilisasi.¹⁸

Menurut Muhammad Nu'aim Yasin syarat-syarat pembolehan transplantasi organ tubuh, yaitu:

1. Transplantasi organ tubuh merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan orang yang didonor dari kerusakan apabila dibiarkan apa adanya. Jika ada jalan lain, maka pendonoran tidak dianjurkan. Menurut Al-Izz bin Abdissalam, “jika kemaslahatan dan kerusakan berkumpul,

¹⁶ Christiawan, *op. cit.*, h. 39.

¹⁷ Hamid Laonso dan M. Jamil, *op. cit.* h. 228.

¹⁸ Rio Christriawan, *op. cit.*, h. 27.

jika memungkinkan untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, maka kita harus melakukannya, walaupun nantinya pencegahan dan hasil yang diinginkan tidak terpenuhi. Jika dampak negatif lebih besar dari dampak positifnya, maka kita harus menepis sisi negatifnya itu tanpa menghiraukan hilangnya kemaslahatan.¹⁹

2. Kemampuan para ahli kedokteran untuk melakukan prediksi yang tepat terhadap kemudharatan dan kemaslahatan yang akan menimpa orang yang didonor (resipien) dan pendonor, dengan melihat keadaan sakitnya, berdasarkan ukuran-ukuran ilmiah yang tepat.
3. Hasil dari perbandingan antara kemaslahatan dan kerusakan yang diakibatkan oleh praktik pendonoran dan keadaan apabila dibiarkan apa adanya, bisa diketahui dengan jelas tingkat perbedaannya, bahwa kemaslahatan pendonoran lebih besar daripada kemaslahatan apabila dibiarkan apa adanya.²⁰
4. Merasa yakin atau mempunyai kemungkinan besar bahwa operasi tersebut akan berhasil.
5. Kesiediaan pihak pendonor dengan menyatakan secara jelas untuk menyumbangkan organ tubuhnya
6. Resipien secara jelas harus mengatakan kesediaannya.

¹⁹ Muhliah Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Grafindo, 1996), h. 98.

²⁰ M. Nu'am Yasin, *Fikih Kedokteran* di terjemahkan oleh Munirul Abidin, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008) h. 194.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSPLANTASI RAHIM

A. Transplantasi Rahim Dalam Dunia Kedokteran

Rahim merupakan bagian dari organ reproduksi yang memiliki fungsi utama sebagai tempat berkembangnya janin, rahim merupakan organ salah satu organ yang ada didalam tubuh. Pada dasarnya, melakukan transplantasi ataupun mendonorkan anggota tubuh salah satunya pada saat hidup tidak boleh dilakukan seperti jantung, hati, karena, kemaslahatan yang ingin dicapai dari donor pada jasad pengguna, tidak jauh lebih besar dari pada kemaslahatan jika organ itu pada jasad pemiliknya, dan kerusakan yang diakibatkan oleh donor lebih besar dari pada kerusakan apabila dibiarkan apa adanya.

Seperti lazimnya operasi transplantasi organ tubuh lain, proses pemindahan rahim dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan mengambil organ rahim dari pendonor yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup. Namun setelah berhasil mewujudkan keinginan penerima donor rahim untuk melahirkan dan memiliki anak, organ rahim yang telah di transplantasikan akan diangkat kembali pasca kelahiran. Hal ini dilakukan agar penerima tidak harus mengkonsumsi obat anti penolakan organ seumur hidup yang akan berdampak pada lemahnya imunitas tubuh penerima organ (*resipien*).¹

Proses operasi transplantasi rahim berjalan seperti proses operasi organ tubuh lainnya. Untuk memindahkan rahim, tim dokter akan menyayat perut

¹ <http://www.kikil.org/forum/Thread-alternatif-terbaru-untuk-hamil-transplantasi-rahim>.

pasien sepanjang enam inci (15,24cm) mulai dari bawah pusar hingga tulang pubis. Untuk itu, penerima organ rahim harus berada dalam keadaan stabil dengan mengkonsumsi obat anti penolakan organ minimal tiga bulan sebelum kehamilan direncanakan.

Setelah itu, embrio yang sudah dibekukan di transfer kedalam rahim baru (*resipien*) dengan cara normal yaitu melalui vagina. Untuk mengurangi resiko komplikasi dan kegagalan kehamilan, setelah proses ini, pasien diharapkan tidak melakukan hubungan seksual.²

Dalam proses pembuahannya, dilakukan di luar rahim melalui proses medis, yaitu sama dengan proses IVF (bayi tabung), dokter akan mengumpulkan sel telur sebanyak-banyaknya. *Ovum* atau sel telur diambil dari *tuba falopii* wanita dan sperma diambil dari ejakulasi Pria.

Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi persyaratan sperma yang berkualitas atau tidak. Kemudian sperma yang telah di keluarkan, di simpan di laboratorium dan kemudian dibekukan untuk menanti saat ovulasi. Sperma yang dibekukan disimpan dalam nitrogen cair.

Begitu juga dengan sel telur istri. Dokter menentukan dengan tepat saat masa subur, karena selama masa subur, wanita akan ber *ovulasi* (keluarnya sel

² <http://www.republika.co.id>

telur dari indung telur), dan memeriksa apakah terdapat sel telur yang masak atau tidak pada saat *ovulasi*.³

Kemudian Dokter memilih sel telur terbaik dengan melakukan seleksi. Pada proses ini, pasien disuntikkan hormon untuk menambah jumlah produksi sel telur. Perangsangan berlangsung 5 - 6 minggu sampai sel telur dianggap cukup matang dan siap dibuahi. Setelah hormon penambah jumlah produksi sel telur bekerja, maka sel telur siap untuk dikumpulkan. Sel telur diambil dengan sejenis jarum suntik melalui sayatan pada perut istri. Sel telur kemudian ditaruh di dalam suatu tabung kimia dan agar telur tetap dalam keadaan hidup, sel telur disimpan di laboratorium yang diberi suhu menyamai panas badan seorang wanita.⁴

Kedua sel kelamin tersebut (sel telur dan sperma) dibiarkan bercampur (*zygot*) dalam tabung sehingga terjadi fertilisasi. *Zygot* yang dihasilkan berkembang dalam media yang terdapat dalam tabung reaksi, sehingga menjadi *morulla* kemudian menjadi embrio. Dokter memilih 3 *embrio* terbaik untuk ditransfer yang diinjeksikan ke sistem reproduksi pasien.⁵

³ Tono Djuwantono dkk, *Memahami Infertiltas*, (Jakarta : Gramedia, 1999), h. 45.

⁴ Reswita, *Assisted Reproduction Technology (ART) Menanti Si Buah Hati: solusi Medis Untuk Masalah Reproduksi*, (Jogjakarta : Penerbit Andi, 2009), h. 171.

⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2000), h. 71.

B. Metode Hukum Islam Dalam Menetapkan Hukum Transpalantasi Rahim

Salah satu alasan yang tepat untuk melakukan transpalantasi rahim adalah akibatnya yang akan memberi manfaat yang lebih terhadap hak Allah. Selama manfaatnya sama, maka kaidah fikih tidak mengizinkan untuk memindahkan hak Allah dari satu tempat ke tempat lain, namun jika manfaatnya lebih besar dari yang sebelumnya, maka fiqh akan membolehkannya. “Kemudaran yang lebih berat dihilangkan dengan kemudaran yang lebih ringan”.⁶

Dalam surat Al Baqarah ayat 195 Allah berfirman:



Artinya: ”...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan....”

Ayat diatas mengandung sebuah ketentuan, bahwa tidak boleh berbuat sesuatu yang dapat merusakkan diri sendiri, termasuk dalam pengertian ini ialah larangan membiarkan diri sendiri tidak terpelihara, sehingga menderita sakitpun dilarang untuk membiarkan diri tanpa diobati. Dengan kata lain mengobati badan di waktu menderita sakit merupakan perintah Allah, termasuk rahim yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya, merupakan cacat tubuh, meskipun tidak mengakibatkan kematian, tetapi dari segi kejiwaaan seorang istri akan

⁶ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masail at- Tibbiyah* (Yogyakarta : Pustaka Fahima, 2007), h. 12.

sangat besar pengaruhnya dan akan menjadi beban mental baginya karena tidak memiliki keturunan.

Mengenai pengaruh kejiwaan akibat cacat jasmani, mudah difahami. Kelainan jasmani yaitu bagian organ tubuh membatasi kemampuan jasmani untuk berfungsi secara wajar. Hal ini dapat mengakibatkan terganggunya kestabilan mental, sedangkan terganggunya kestabilan mental mengakibatkan terganggunya kesehatan jasmani. Badan sebagai tubuh kasar dan fungsi-fungsi kejiwaan yang ada di dalamnya dapat sakit atau terganggu oleh karena terjadi keadaan emosional.⁷ Dari uraian di atas, dapat difahami bahwa cacat jasmani dapat mengakibatkan kesehatan jiwa terganggu sebaliknya jiwa yang terganggu akan menyebabkan kesehatan jasmani terganggu.

Para ulama' yang mendukung pembolehan transplantasi berpendapat bahwa transplantasi rahim harus dipahami sebagai bentuk layanan bagi sesama muslim. Pendapat mereka tentang transplantasi rahim diantaranya, sebagai kesejahteraan Publik (*al-mashlahah*). Islam memang melarang segala bentuk agresi terhadap nyawa manusia, termasuk terhadap tubuh seseorang yang sudah menjadi mayat. Jadi, meskipun melepaskan salah satu organ tubuh manusia yang sudah meninggal untuk ditransplantasikan pada tubuh orang lain, dapat dikategorikan dengan mutilasi terhadap tubuh manusia dan pelanggaran terhadap kehormatan mayat tersebut. Namun, perlu dicatat bahwa sistem hukum

⁷ Siti Maekhari, *Mental Hygiene dan Kelainan Mental*, (Jakarta : EGC Gramedia, 1998). h. 27.

Islam juga memasukkan kepentingan manusia sebagai bahan pertimbangan. Hal ini berdasarkan kaidah *ushul fiqh* berikut:

الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Kondisi darurat dapat membuat sesuatu yang terlarang menjadi boleh”.⁸

الضَّرَرُ الْأَشَدُّ يُزَالُ بِالضَّرَرِ الْأَخَفِ

“Kemudharatan yang lebih berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan”⁹

Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-dharar al-asyadd yuzaalu bi al-dharar al-akhaff*)” atau “Jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil risikonya (*Idza ta’aradlat al-mafsadatani ruu’iya a’dhamuhuma dlararan*)”. Kaidah lain Apabila ada dua kerusakan, maka diambil kerusakan yang lebih ringan.¹⁰

Dalam melakukan tindakan transplantasi rahim yang tujuannya jelas yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dan tindakan ini merupakan bentuk *ihthiyar* pasangan suami istri untuk melakukan pengobatan setelah melakukan berbagai alternatif, tetapi mengalami kegagalan, maka transplantsi rahim

⁸ Abdul Hamid Hakim, *al Bayan*, (Jakarta : Sa’adiyah Putra, 1983). h. 80.

⁹ *Ibid*, h. 81- 82.

¹⁰ *Ibid*, h. 82.

merupakan cara untuk memperoleh keturunan karena adanya kerusakan ataupun kelainan organ rahim yang pada saat ini tidak bisa diobati dengan cara lain.

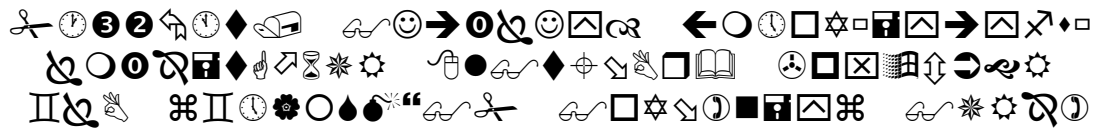
Keperluan yang mendesak ini dapat digolongkan pada tingkat darurat, sesuai dengan *Qaidah Usul Fiqh* disebutkan: “Hajat itu menempati tempatnya posisi kemadaratan”.¹¹

Karena itu, transplantasi organ rahim merupakan pengecualian. Sebagai organ tubuh yang berfungsi sebagai alat reproduksi, yang tidak menyebabkan kematian jika organ tubuh tersebut kehilangan tugasnya yang mendasar pada pemiliknya, dan tetap berfungsi dengan baik jika dipindahkan kepada orang lain (resipien) yang. Disamping itu juga, tidak mengakibatkan bahaya pada pemilknya (pendonor), jika indung telur seorang wanita rusak baik karena penyakit kangker indung telur, penyakit tumor, maupun sebab lainnya, yang mengakibatkan dia tidak bisa lagi menghasilkan sel telur, baik pada masa sekarang maupun yang akan datang

Dalam keadaan seperti dalam bahasan di atas, maka boleh hukumnya bagi wanita itu untuk mendonorkan rahimnya kepada wanita yang mengalami kerusakan rahim, dengan syarat indung telurnya masih berfungsi dengan baik. Tindakan ini diperbolehkan karena transplantasi rahim tidak menyebabkan percampuran nasab. Faktanya, manusia di ciptakan Allah melalui *nutfah* yang bercampur dengan sel telur yang dihasilkan oleh *ovarium* dan di proses dalam *tuba fallopi* hingga terbentuk embrio, embrio atau bakal janin inilah yang akan

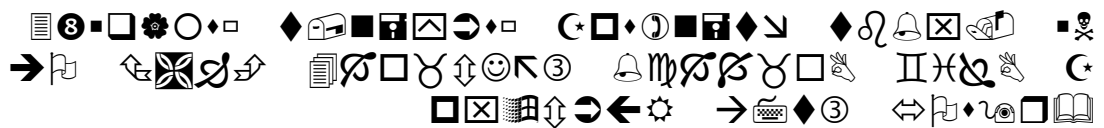
¹¹ Walid bin Rasyid as-Sa'idan, *Al-Qawa'id asy Syar'iyah fi al-Masa'il at-Tibbiyah*,

menempel pada dinding rahim dan berkembang hingga saat melahirkan. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Insan : 2



“Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat”.

Dalam Q.S. Al-Qiyamah : 37-38 , Allah menjelaskan tentang proses penciptaan manusia.



“Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (kedalam rahim), kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya, dan menyempurnakannya”

Menurut Muhammad Nu’aim Yasin,¹² alasan yang mendasar bolehnya mendonorkan rahim kepada orang yang akan mentransplantasi adalah bahwa transplantasi rahim tidak mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor. Dan dalam pelaksanaannya di yakini oleh tim medis bahwa rahim *sterill* dari sel telur lama yang masi hidup di dalamnya atau sel sperma lama yang masi hidup.

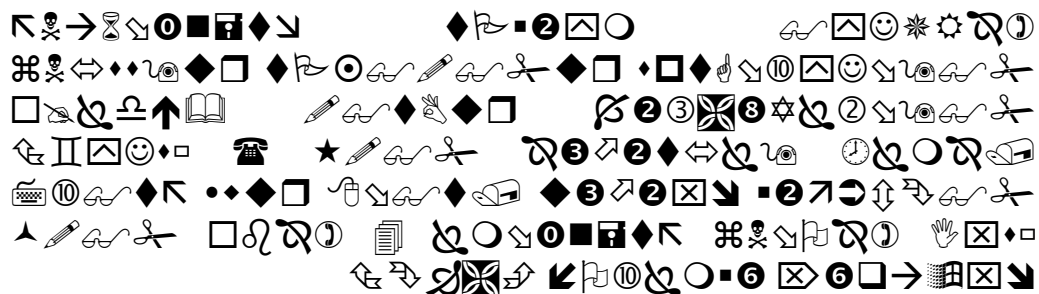
¹² M. Nu’aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 205

Bila ketentuan diatas terpenuhi maka kerusakan yang ingin di tanggulasi melalui pendonoran transplantasi rahim ini lebih besar dari pada kerusakan yang terjadi apabila dibiarkan apa adanya, maka dalam kondisi semacam ini, transplantasi rahim di bolehkan.¹³

Prinsip kebolehan ini didasarkan kepada beberapa hal, yaitu dengan alasan dan dalil sebagai berikut:

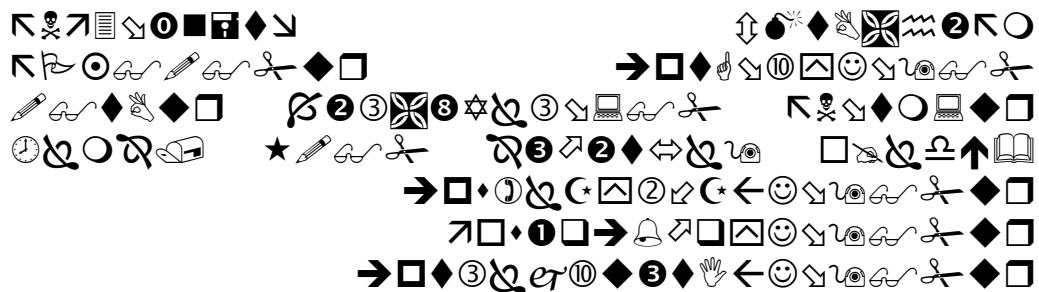
a. Ayat-ayat tentang dibolehkannya mengkonsumsi barang-barang haram

dalam kondisi benar-benar darurat. Antara lain. QS. Al-Baqarah/2:173 :



“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

QS. Al-Maidah/5:3 :



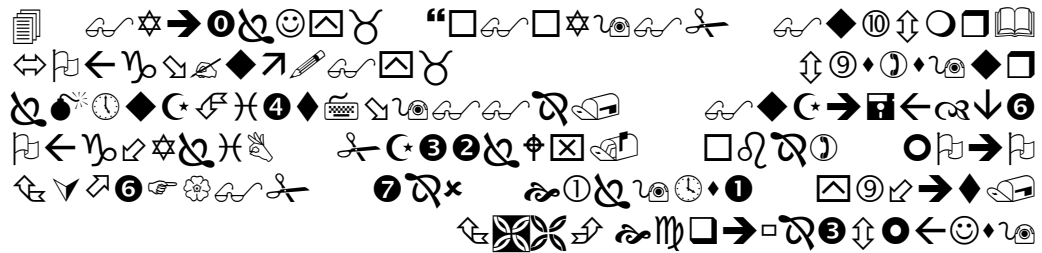
¹³ Ibid, h. 206

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)

QS. Al-An'am:6:119. dan 145 :

[illegible]

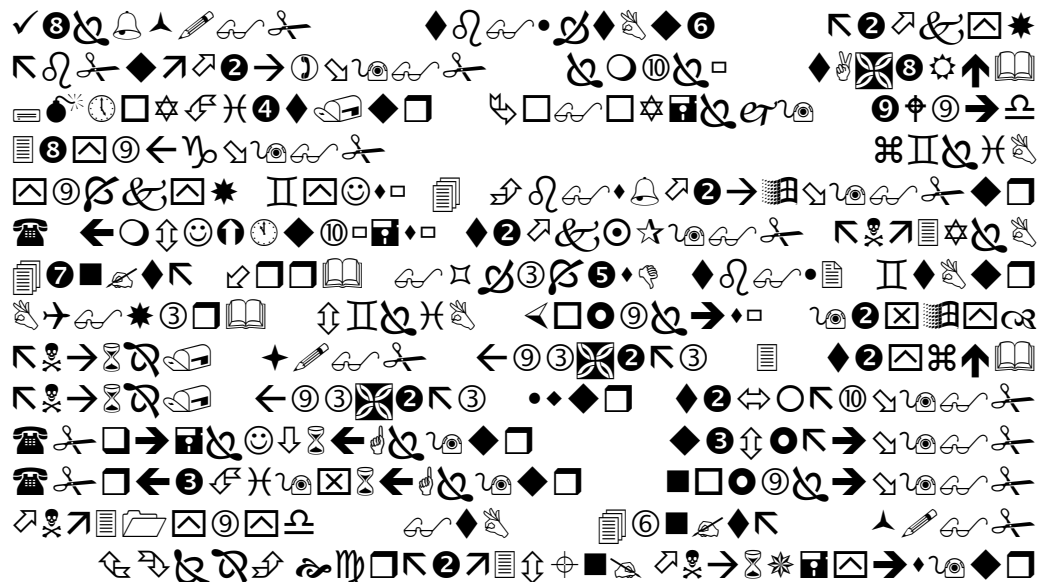
[illegible]



“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, Kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi”.

c. Ayat-ayat tentang keringanan dan kemudahan dalam Islam antara lain adalah

QS. Al-Baqarah/2:185 :



“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan

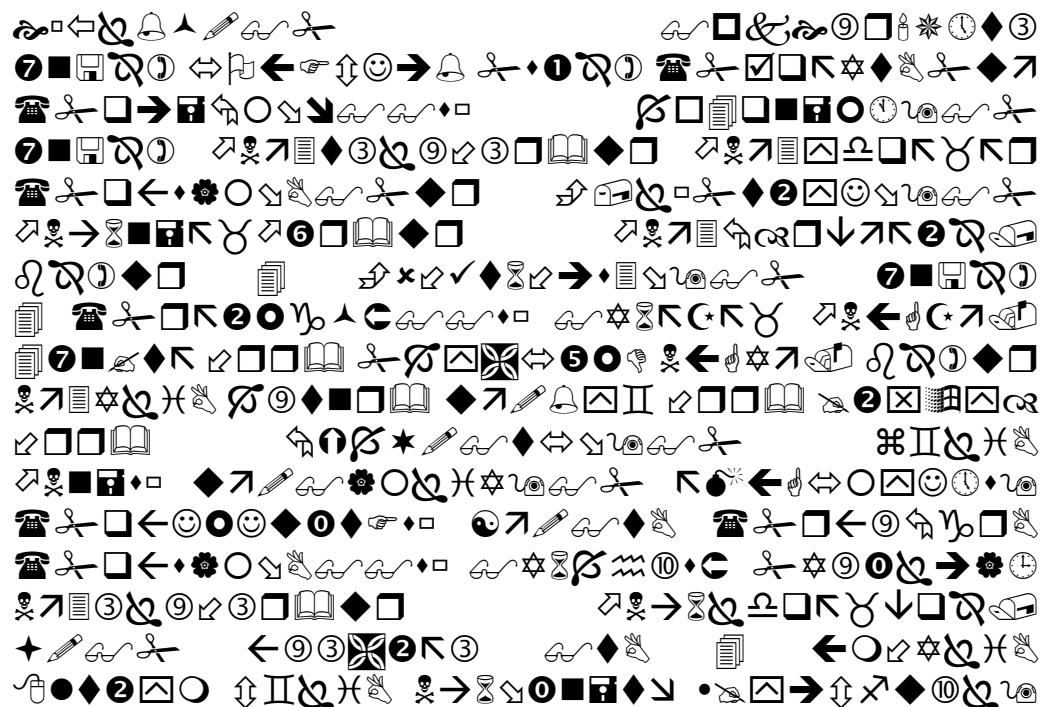
barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.

QS. Al-Nisa’/4:28 :



“Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah”.

QS. Al-Maidah/5:6 :



Dan QS. Al-Hajj/22:78 :

[illegible]

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) Agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) Telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan

supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah Sembahyang, tunaikanlah Zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.

- d. Hal itu sebagai amal jariyah bagi donatur yang telah mati dan sangat berguna bagi kemanusiaan. Dan Allah sangat menghargai dan memuji orang-orang yang berlaku 'itsaar' tanpa pamrih dan dengan tidak sengaja membahayakan dirinya atau membinasakannya.
- f. Kaedah-kaedah umum hukum Islam yang mengharuskan dihilangkannya segala bahaya.

Oleh sebab itu, maka penulis berpendapat bahwa transplantasi rahim pada dasarnya dibolehkan, dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Transplantasi rahim menjadi satu-satunya cara untuk memperoleh keturunan bagi mereka yang mengalami kerusakan ataupun kelainan organ rahim yang pada saat ini tidak bisa diobati dengan cara lain.
- b. Transplantasi rahim yang dilakukan tidak mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.
- c. Proses transplantasi dilaksanakan ketika mendapat keyakinan secara medis atau oleh tim medis bahwa rahim *sterill* dari sel telur lama yang masih hidup didalamnya atau sel sperma lama yang masih hidup. Sehingga tidak ada kekhawatiran adanya percampuran sperma lama dan yang baru.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses operasi transplantasi rahim berjalan seperti proses operasi organ tubuh lainnya. Untuk memindahkan rahim, tim dokter akan menyayat perut pasien sepanjang enam inci (15,24cm) mulai dari bawah pusar hingga tulang pubis. Untuk itu, penerima organ rahim harus berada dalam keadaan stabil dengan mengkonsumsi obat anti penolakan organ minimal tiga bulan sebelum kehamilan direncanakan. Setelah itu, embrio yang sudah dibekukan di transfer kedalam rahim baru (*resipien*) dengan cara normal yaitu melalui vagina. Untuk mengurangi resiko komplikasi dan kegagalan kehamilan, setelah proses ini, pasien diharapkan tidak melakukan hubungan seksual.
2. Seorang wanita dapat mendonorkan rahimnya kepada wanita lain yang mengalami kerusakan rahim, dengan syarat indung telornya masih berfungsi dengan baik. Tindakan ini menurut Hukum Islam diperbolehkan karena transpalantasi rahim tidak menyebabkan terjadinya pencampuran nasab dan tidak pula mempengaruhi kelangsungan hidup pendonor.

B. Saran-saran

1. Kepada Lembaga kajian Hukum Islam dan pakar Hukum Islam:
Sampai saat ini keputusan lembaga kajian hukum Islam masih bersifat parsial dalam melakukan proses istinbad hukum Islam, hendaknya dilakukan bersama banyak tokoh dengan melakukan pendekatan indisiplineir supaya dapat diketahui secara detail dampak positif dan negatifnya.
2. Kepada dokter yang menangani transplantasi rahim, hendaknya meyakini secara medis bahwa tindakan transplantasi membawa *maslaha* yang lebih besar dari pada *mudaratnya*. Dalam melaksanakan transplantasi rahim perlu kehati-hatian dan ketelitian agar terhindar terjadinya percampuran nasab.
3. Kepada pasien yang ingin melakukan transplantasi rahim, Sebelum memilih melakukan transplantasi hendaknya benar-benar mempertimbangkan bahwa langkah ini sebagai alternatif, jika sudah tidak ditemukan cara pengobatan lain.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A.s Homby,sc,*The Advance Learner's Dictionary of Current English*, t.t
- Abdul Hamid Hakim, *Al bayan*, Sa'adiyah putra Jakarta,1983
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia cet ke2*, Kencana, Jakarta, 2008
- Abdul Qadim Zallum, *Beberapa Problem Kontemporer Dalam Pandangan Hukum Islam*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta t.t
- Abu fadl Mohsin Ebrahim, *Fikih kesehatan*, Serambi, Jakarta, 2007
- Abu Zahrah, Muhammad, *Al Ahwal Al Syahsiyah*, Dar Al fikr Al Arabi, kairo 2005
- Abuddin Nata, *Masail Al-Fiqhiyah, Ed.I*, Jakarta, Cet.I, P.T. Predana Media, 2003
- Adib Bisri dan Munawwir A. Fatah, *Kamus Al Bisri*, Pustaka Progresif, Surabaya, 1999
- Agus Mustofa, *Heboh Spare Part Manusia serial ke 22 Diskusi Tasawuf Modern*, PADMA Press, Surabaya, t.t
- Agustini Sari Dewi (ed), *Hanya 7 Hari Memahami infertilitas*, PT Refika Aditama, Bandung, 2008
- Ajat Sudrajat, *Fikih Aktual*, STAIN Ponorogo, 2008
- Ali Al Sabuni, Muhammad, *Sofwah Al Tafasir*, Dar Al kutub Al ilmiah Jakarta, 1999
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2004
- Bayyinatul Muchtaromah, *Pendidikan Reproduksi bagi Anak Menuju Akil Baligh*, UIN Malang Press, 2008
- Bukhari, Imam, *Sahih Al-Bukhari kitab al hudud*, darul hadis|, kairo, 2004
- Chuzaimah T. Yanggo, Hafiz Ansary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud III*, Darul Fikr, Beirut, , t.t.
- Depdiknas, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed.3*, Jakarta, Cet.2, Balai Pustaka, 2002
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, Cet. I, Jakarta, Logos Publishing House, 1995
- Hambal, bin Ahmad, *al musnad*, Maktabah Al-turos al-islami,t.t

- Hamid Laonso dan M. Jamil, *Hukum Islam Alternatif; Solusi Terhadap Masalah Fiqih*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- Hasyim abbas, *Prespektif Normatif Islam Tentang Hukum tranplantasi*, Paramedia, 2000
- Ida Bagus Manuaba, , *Ilmu kebidanan, Penyakit Kandungan dan keluarga Berencana untuk Pendidikan Bidan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta : Gramedia, 1998.
- J.Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*,
- Kan'an, Ahmad Muhammad, *Al Mausu'ah Al Tibbiah Al Fiqhiah*, Dar Al Nafa'is, Beirut, t.t
- Khatib, Yahya Abdurrahman, *Ahkam al-Mar'ah al-Haml fi Syariat al-islamiyyah*, Darun Nafais, Beirut, 1999
- Luthfi Assyaukanie, *Politik HAM, dan isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998
- Mahjuddin, *Masailil Fiqhiyah Berbagai kasus yang di hadapi Hukum Islam masa kini*, Kalam Mulia, Jakarta, 2003
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Toko gunung Agung, Jakarta, 1997
- Mas'udi Masdar, *islam dan hak-hak reproduksi wanita*, Mizan, Bandung, 1997
- Maurice Bucaille, *Dari Mana manusia Berasal ? Antara Sains, Bibel dan Al-Qur'an*, Mizania, tt
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, Lentera, 2007
- Muhammad Izzuddin Taufiq, *Al-Qur'an dan Embriologi (ayat-ayat tentang Penciptaan Manusia)*, Tiga Serangkai, Solo, 2006
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Gunung Agung, Jakarta, 1997
- Pius A Partanto. M. Dahlan Al-Barry, kamus ilmiah populer, tt
- Qardlhawi, Yusuf, *Fatwa Kontemporer*, Mizan, Jakarta 2000
- Reswita, *Asisted Reproduction Technology (ART) Menanti si Buah hati: Solusi Medis Reproduksi*, Penerbit Andi, Jogjakarta, 2009
- Rio Christiawan, *Aspek Hukum Kesehatan Dalam Upaya Medis transplantasi Organ Tubuh*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2003
- Saidan, Walid bin Rasyid, *Al-Qawaid asy-syr'iyyah fi al-Masa'il at-tibbiyah*, Pustaka Fahima, Yogyakarta, 2007
- Shirazi, *Al-Muhadhdhab fi Fiqh Madhhab Imam al-shafi'I* , tt
- Soumy Ana, *Menjaga Kesuburan*, Prestasi, Jakarta, 2008

- Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. I, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999
- Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, Jakarta, Cet.2, Sinar Grafika Offset, 1996
- WJS poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, 1993
- Yasin, Muhammad Nu'aim, *Fiqh Kedokteran*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2008
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'an, *al-Qur'an al-Karim wa Tarjamah Ma'anihi Ila al-Lughah al-Indunisiyah*, t.t
- Zahro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU: Lembaga Bahtsul Masail 1926-1999*, Yogyakarta, Cet.I, P.T. LKis Pelangi Aksara, 2004
- Zuhaili, Wahbah, *Al fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* juz 10, Dar Al fikr Al Muasir, Damaskus, 2004
- <http://e-kehamilan.blogspot.com/2009/03/proses-bayi-tabung-ivf.html>
- <http://www.f-buzz.com/2008/08/05/transplantasi-rahim/>
- <http://www.republika.co.id>